Kementerian
Kependudukan
dan Pembangunan
Keluarga/BKKBN

Mojokerto
Full of Majapahit Greatness

KOMPILASI DATA
HASIL PEMUTAKHIRAN PENDATAAN KELUARGA KABUPATEN MOJOKERTO

TAHUN 2025

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan

SAMBUTAN

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN MOJOKERTO

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya kegiatan Publikasi Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2024 (PK-24) di Kabupaten Mojokerto. Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen kita bersama dalam membangun perencanaan pembangunan keluarga yang berbasis data akurat, mutakhir, dan terpercaya.

Publikasi ini menjadi sangat penting sebagai bentuk transparansi informasi serta sarana penyebarluasan data dan hasil pemutakhiran kepada seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, maupun desa. Data hasil PK-24 mencakup berbagai informasi strategis mengenai struktur dan kondisi keluarga, yang menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, dan intervensi di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pembangunan keluarga, serta penurunan stunting.

Dengan tersajinya publikasi ini, kami berharap seluruh stakeholder dapat memanfaatkannya secara optimal, baik dalam menyusun perencanaan pembangunan di wilayah masing-masing, maupun dalam pengambilan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hasil pemutakhiran ini juga dapat dijadikan rujukan penting dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional dan daerah.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses pendataan, pengolahan, hingga penyusunan publikasi ini. Khususnya kepada para kader, petugas lapangan, tim pengolah data, serta seluruh mitra kerja di Kabupaten Mojokerto yang telah bekerja keras dan penuh dedikasi.

Semoga kegiatan publikasi ini membawa manfaat yang sebesar-besarnya dalam mendukung perwujudan keluarga berkualitas dan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Mojokerto. Mari terus kita jaga sinergi dan kolaborasi demi mewujudkan Mojokerto yang lebih maju dan sejahtera.

Mojokerto, 14 Agustus 2025

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan,

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO DP2KBP2

Sugeng Nuryadi, S.IP., M.M.

DAFTAR ISI

SAMBUTAN.....1
DAFTAR ISI.....2
LATAR BELAKANG.....3
TUJUAN DAN MANFAAT.....4
METODOLOGI.....5
DEFINISI ISTILAH.....7
INDIKATOR KEPENDUDUKAN.....10
INDIKATOR KELUARGA BERENCANA.....23
INDIKATOR PEMBANGUNAN KELUARGA.....37
PERBANDINGAN.....49
KESIMPULAN.....56

LATAR BELAKANG

Pendataan Keluarga adalah tugas yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014. Setiap lima tahun, pendataan ini harus diperbarui setiap tahun oleh pemerintah daerah. Pendataan Keluarga Tahun 2024 (PK-24) yang ketiga bertujuan untuk memperbaiki dan mencatat mutasi serta migrasi dan menambah keluarga baru dalam Basis Data Keluarga Indonesia.

Data PK-24 akan digunakan untuk mengukur indikator dalam RPJMN 2020–2024, terutama untuk mengatasi kemiskinan ekstrem dan stunting. BKKBN bertanggung jawab menyediakan data ini untuk kebijakan yang tepat. PK-24 juga memenuhi kebutuhan data kementerian, termasuk informasi tentang penyandang disabilitas dan anak usia 24–59 bulan untuk pengukuran ECDI. Pengukuran ECDI berkontribusi pada pencapaian SDGs. Oleh karena itu, PK-24 harus terus diperbarui dan dilaksanakan sesuai pedoman teknis di semua tingkatan.

TUJUAN

Tujuan utama dari pembuatan publikasi data hasil pemutakhiran pendataan keluarga ini adalah untuk menyampaikan hasil pemutakhiran data keluarga secara sistematis, akurat, dan terkini sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program pembangunan keluarga, pengendalian penduduk, serta intervensi kebijakan lintas sektor di tingkat daerah Kabupaten Mojokerto

MANFAAT

01 Sebagai dasar pengambilan kebijakan dan intervensi program oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga, penghapusan kemiskinan, serta percepatan penurunan stunting.

02 Memberikan gambaran menyeluruh dan terkini tentang kondisi keluarga di Kabupaten Mojokerto, termasuk data terkait mutase, migrasi, keluarga baru, penyandang disabilitas, dan perkembangan anak usia dini (ECDI), sehingga mempermudah perencanaan program lintas sektor.

03 Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pemutakhiran data keluarga, melalui penyajian data secara visual dan naratif yang mudah dipahami oleh masyarakat, mitra kerja, serta instansi terkait di tingkat daerah maupun pusat.

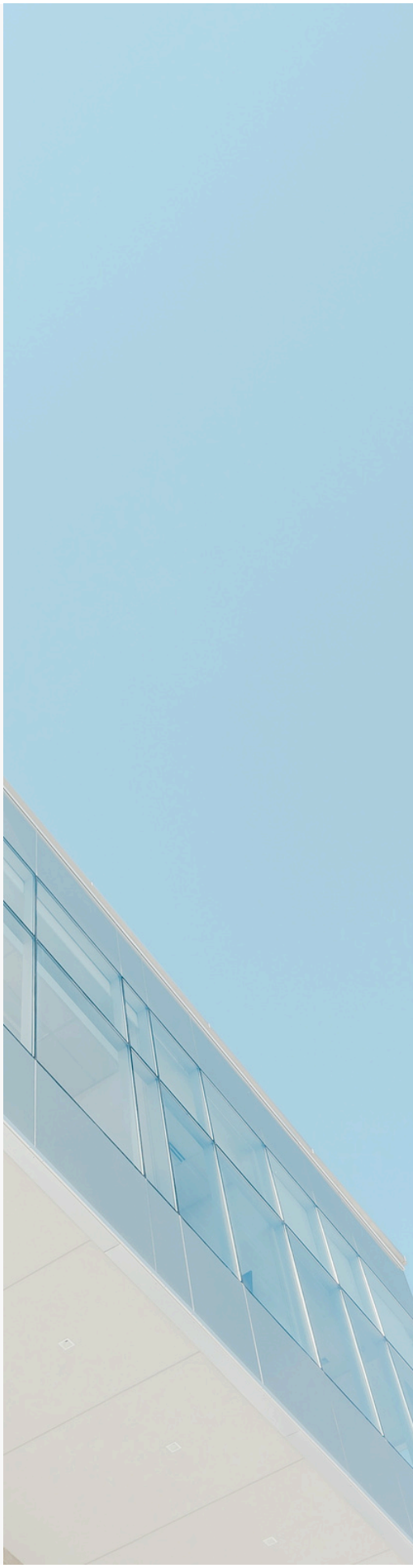

METODOLOGI

Lokus dan Sasaran

Pendataan Keluarga PK-24 menggunakan desa/kelurahan sampel yang dipilih berdasarkan kerangka sampel dan target keluarga terdata. Tujuan penentuan sampel ini adalah agar hasil pemutakhiran dapat menggambarkan kondisi populasi secara lebih representatif, sekaligus menyediakan data indikator kinerja Program Bangga Kencana.

Target pendataan adalah seluruh kepala keluarga (KK) yang ada di desa/kelurahan sampel, baik keluarga yang sudah tercatat pada pendataan keluarga sebelumnya (PK-22 dan PK-23) maupun keluarga baru yang belum pernah terdata. Desa atau kelurahan prioritas dipilih berdasarkan arah kebijakan pelaksanaan PK-24, yakni peningkatan cakupan dan kualitas basis data keluarga.

Berdasarkan Surat Edaran Bupati Nomor 188/4893/416-108/2024 tentang Pelaksanaan Pendataan Keluarga 2024 di Kabupaten Mojokerto, telah dilaksanakan pemutakhiran pendataan keluarga di 6 kecamatan dengan 22 desa.

NO	Kecamatan	Desa
1	PACET	1. KESIMANTENGAH 2. CLAKET 3. TANJUNGKENONGO
2	PUNGGING	1. BANJARTANGGUL 2. TUNGGALPAGER 3. BANGUN
3	DLANGGU	1. SEGUNUNG 2. RANDUGENENGAN 3. TUMAPEL 4. TALOK 5. KEDUNGLENGKONG
4	GEDEG	1. GEMBONGAN 2. TERUSAN 3. BATANKRAJAN
5	DAWARBLANDONG	1. GUNUNGSARI 2. PUCUK 3. RANDEGAN 4. SIMONGAGROK 5. BRAYUBLANDONG
6	TROWULAN	1. JAMBUWOK 2. WATESUMPAK 3. TROWULAN

Secara ideal, seluruh keluarga sasaran dalam desa/kelurahan lokus dilakukan pemutakhiran. Namun, jumlah keluarga yang dipilih dapat disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya agar target pemutakhiran di tingkat provinsi tetap tercapai.

METODOLOGI

Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan Pemerintah berkaitan dengan percepatan penurunan stunting, Implementasi Kampung Keluarga Berkualitas, dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Pendataan Keluarga PK-24 dilaksanakan pada lokus yang telah ditentukan melalui kunjungan rumah ke rumah untuk wawancara dan observasi oleh kader pendata setempat di bawah pembinaan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) serta dikoordinasikan dengan manajer di tingkat Kecamatan. Metode pengumpulan data pada Pemutakhiran PK24 ini akan menggunakan metode survei dengan alat pengumpulan data berbasis *smartphone*.

Sarana Pengumpulan Data

Pengumpulan data keluarga dilakukan dengan dua sarana utama, yaitu formulir dan aplikasi berbasis android.

- Formulir terdiri dari tiga jenis:
  a. Formulir berisi data keluarga yang sudah ada dalam basis data untuk diperbarui,
  b. Formulir kosong untuk keluarga baru,
  c. Formulir survei ECDI bagi anak usia 24–59 bulan.
- Aplikasi Pemutakhiran PK-24 digunakan untuk pencatatan data berbasis android. Target penggunaannya adalah 80% dari total pengumpulan data, khususnya di wilayah dengan infrastruktur memadai.

Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah tahap pengumpulan oleh kader pendata. Terdapat dua mekanisme utama sesuai dengan sarana pengumpulan yang digunakan:

1. Pengolahan Data dengan *Smartphone*.
2. Data yang dikumpulkan melalui aplikasi android langsung masuk ke sistem pusat secara *real time*. Metode ini lebih efisien, akurat, dan mengurangi potensi kesalahan input karena sudah dilengkapi validasi otomatis.

Dengan alur ini, keakuratan dan kelengkapan data tetap terjamin meskipun terdapat perbedaan kondisi infrastruktur antar wilayah.

DEFINISI ISTILAH

Lansia

Lansia adalah singkatan dari Lanjut Usia, yang merujuk pada kelompok usia yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Menurut *World Health Organization* (WHO), seseorang dikategorikan sebagai lansia jika sudah berusia 60 tahun atau lebih. Badan Pusat Statistik (BPS) juga menggunakan batasan usia ini untuk mengklasifikasikan lansia. BPS juga membagi lansia menjadi tiga kelompok umur: lansia muda pada rentang usia 60-69 tahun, lansia madya di rentang usia 70-79 tahun, dan lansia tua di umur 80 tahun ke atas.

Bangga Kencana

Bangga Kencana adalah singkatan dari Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana. Program ini bertujuan untuk mewujudkan keluarga berkualitas dan hidup dalam lingkungan yang sehat. Bangga Kencana merupakan rebranding dari program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Bangga Kencana berfokus pada peningkatan kualitas keluarga, termasuk Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi yang memperhatikan dinamika pertumbuhan penduduk dan dampaknya terhadap pembangunan.

WANITA USIA SUBUR (WUS)

Wanita usai subur (WUS) adalah wanita yang berada dalam rentang usia dimana ia mampu untuk hamil dan melahirkan, umumnya antara 15 tahun hingga 49 tahun. Masa ini dikenal sebagai masa reproduksi, dimulai dari pertama menstruasi hingga berhentinya menstruasi atau menopause. WUS mencakup wanita yang belum menikah, menikah, maupun janda. Bagi Wanita Usia Subur, penting untuk menjaga kebersihan diri untuk mencegah gangguan reproduksi.

UNMETNEED

Unmetneed dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai "kebutuhan yang tidak terpenuhi" atau "kebutuhan yang belum terpenuhi". Istilah ini sering digunakan dalam konteks program keluarga berencana (KB) dan menggambarkan perempuan menikah yang memiliki keinginan untuk menunda atau membatasi kehamilan, tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi. tingginya angka *unmetneed* dapat menyebabkan peningkatan angkat kelahiran yang tidak diinginkan, peningkataan resiko kehamilan pada wanita yang tidak ingin hamil, dan peningkatan risiko kematian ibu akibat persalinan yang tidak aman. *Unmetneed* seringkali disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya akses terhadap layanan KB, kurangnya informasi tentang kontrasepsi, serta masalah sosial dan budaya. Untuk mengatasi *unmetneed*, diperlukan upaya peningkatan akses terhadap layanan KB, peningkatan kualitas informasi tentang kontrasepsi, serta pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan preferensi perempuan.

PASANGAN USIA SUBUR (PUS)

Pasangan Usia Subur adalah pasangan suami istri yang istrinya berusia 15-49 tahun atau pasangan suami istri yang istrinya berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid.

BINA KELUARGA BALITA (BKB)

Bina Keluarga Balita adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuandan keterampilan orang tua dalam mendidik anak balita. BKB terintegrasi dengan layanan Posyandu dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Kelompok BKB umumnya terdiri dari keluarga muda dengan anggota yang mempunyai anak balita (di bawah usia tiga tahun) atau anak balita (di bawah usia lima tahun).

BINA KELUARGA REMAJA (BKR)

Program Bina Keluarga Remaja adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam membina remaja. Program ini dirancang untuk membantu keluarga dalam mendidik, mengasuh, dan membimbing remaja agar tumbuh dan berkembang secara optimal dalam berbagai aspek kehidupan, seperti fisik, mental, sosial, dan emosional.

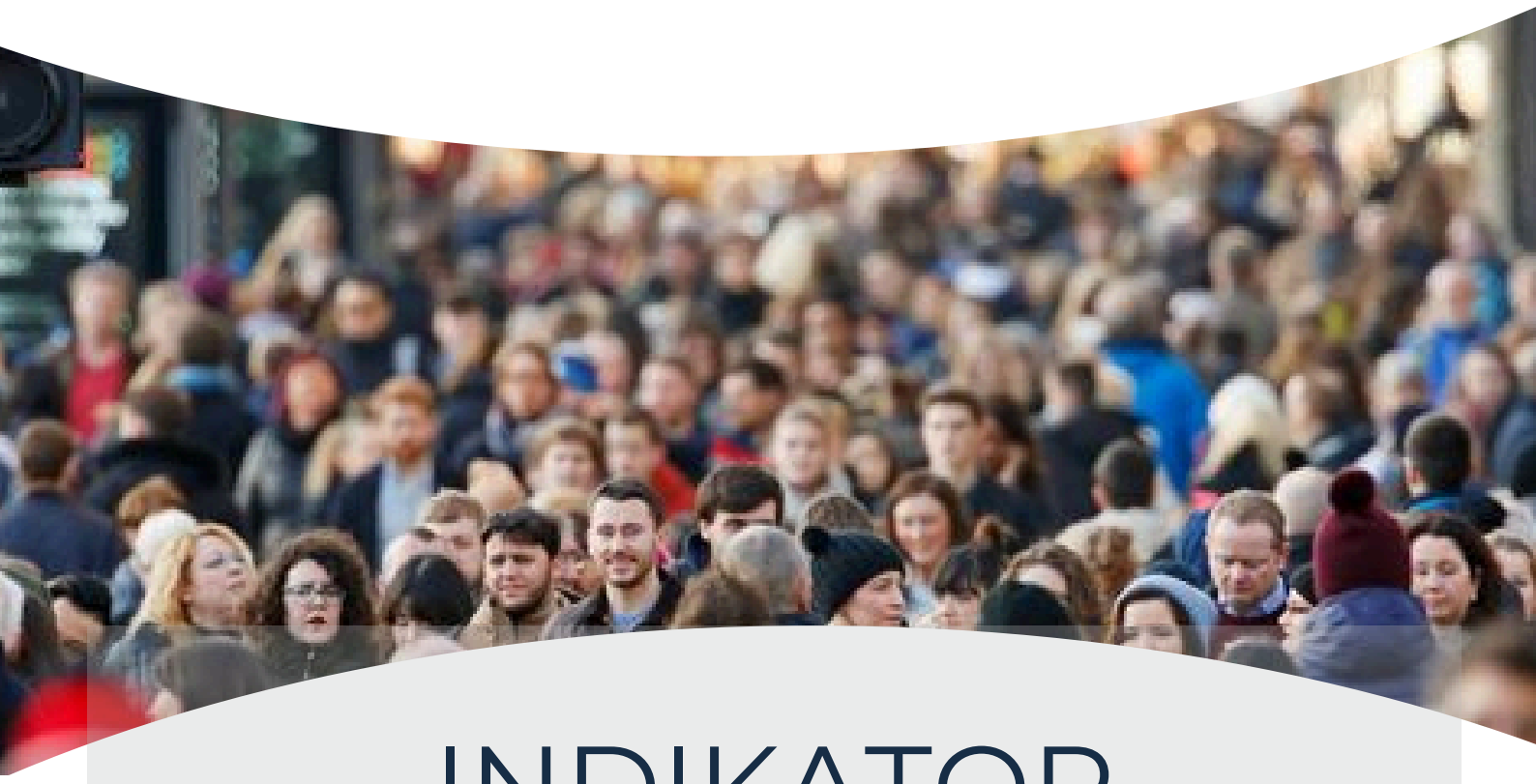

INDIKATOR
KEPENDUDUKAN

JUMLAH KEPALA KELUARGA MENURUT UMUR

Berdasarkan hasil pemutakhiran pendataan keluarga pada tahun 2024 di Kabupaten Mojokerto, diperoleh gambaran demografis mengenai jumlah kepala keluarga menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Data menunjukan bahwa jumlah kepala keluarga laki-laki secara signifikan lebih banyak dibandingkan dengan perempuan, yaitu sebanyak 293.266 jiwa atau 84,2%, sedangkan kepala keluarga perempuan berjumlah 54.821 jiwa atau 15,8%.

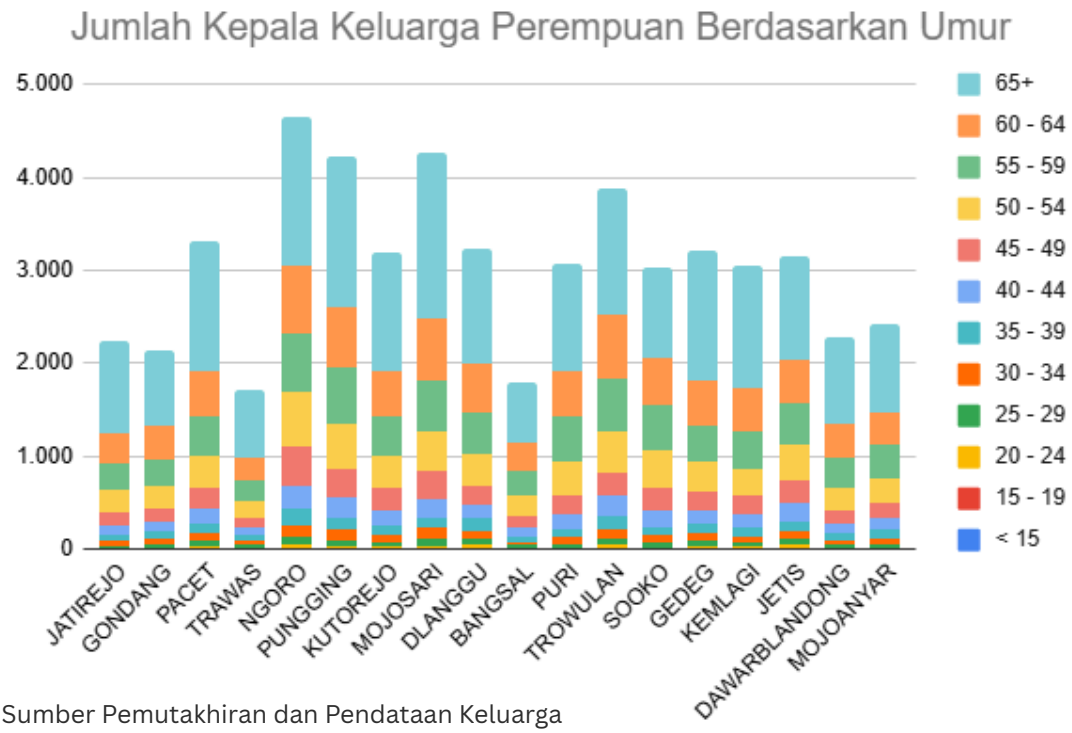

Sumber Pemutakhiran dan Pendataan Keluarga

Grafik 1 Jumlah Kepala Keluarga Perempuan menurut Umur

Distribusi kepala keluarga laki-laki didominasi oleh kelompok usia produktif, yaitu antara umur 35 hingga 49 tahun. Kelompok usia terbanyak berada pada rentang umur 40-44 tahun dengan jumlah 39.423 jiwa, disusul oleh usia 45-49 tahun sebanyak 36.576 jiwa, serta usia 35-39 tahun sebanyak 32.644 jiwa.
Kecamatan dengan kepala keluarga laki-laki terbanyak adalah Jetis, Ngoro, dan Pungging. Kepala keluarga perempuan terbanyak berada di Ngoro, Pungging, dan Mojosari. Banyaknya kepala keluarga laki-laki yang produktif menunjukkan potensi untuk meningkatkan ekonomi keluarga melalui program pemberdayaan dan pelatihan.

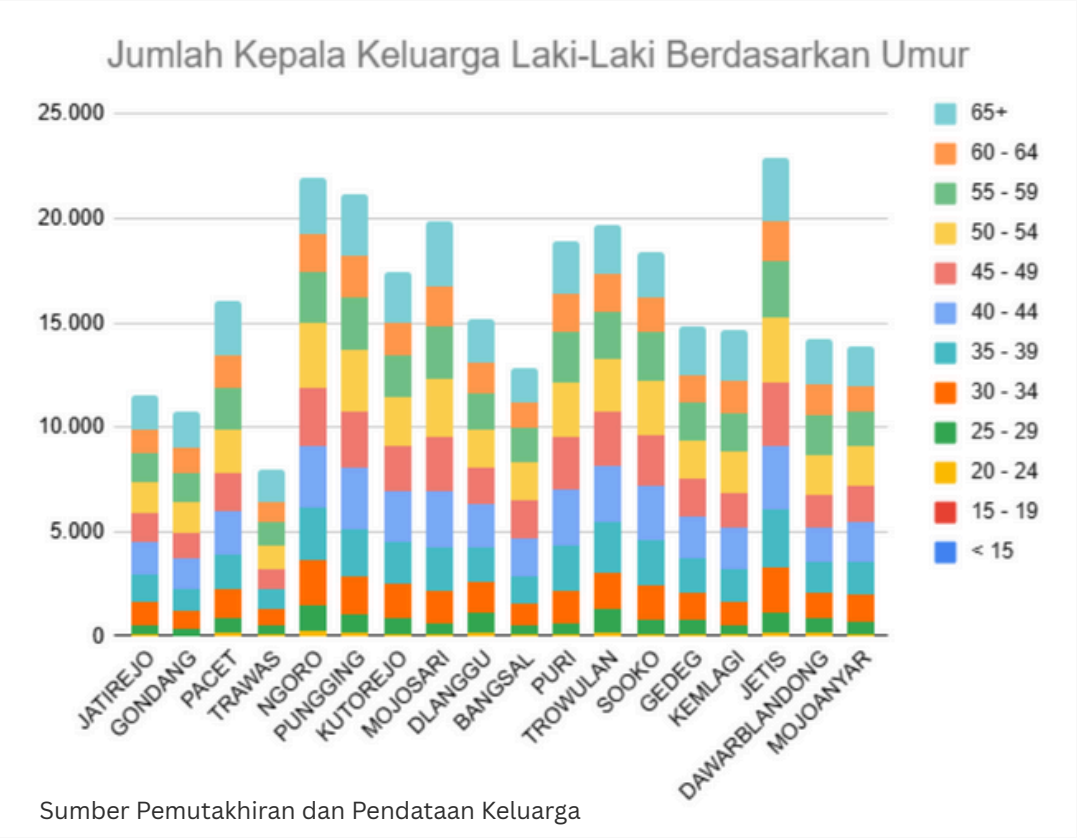

Sumber Pemutakhiran dan Pendataan Keluarga

Grafik 2 Jumlah Kepala Keluarga Laki-Laki menurut Umur

JUMLAH KELUARGA MENURUT UMUR ANAK YANG DIMILIKI

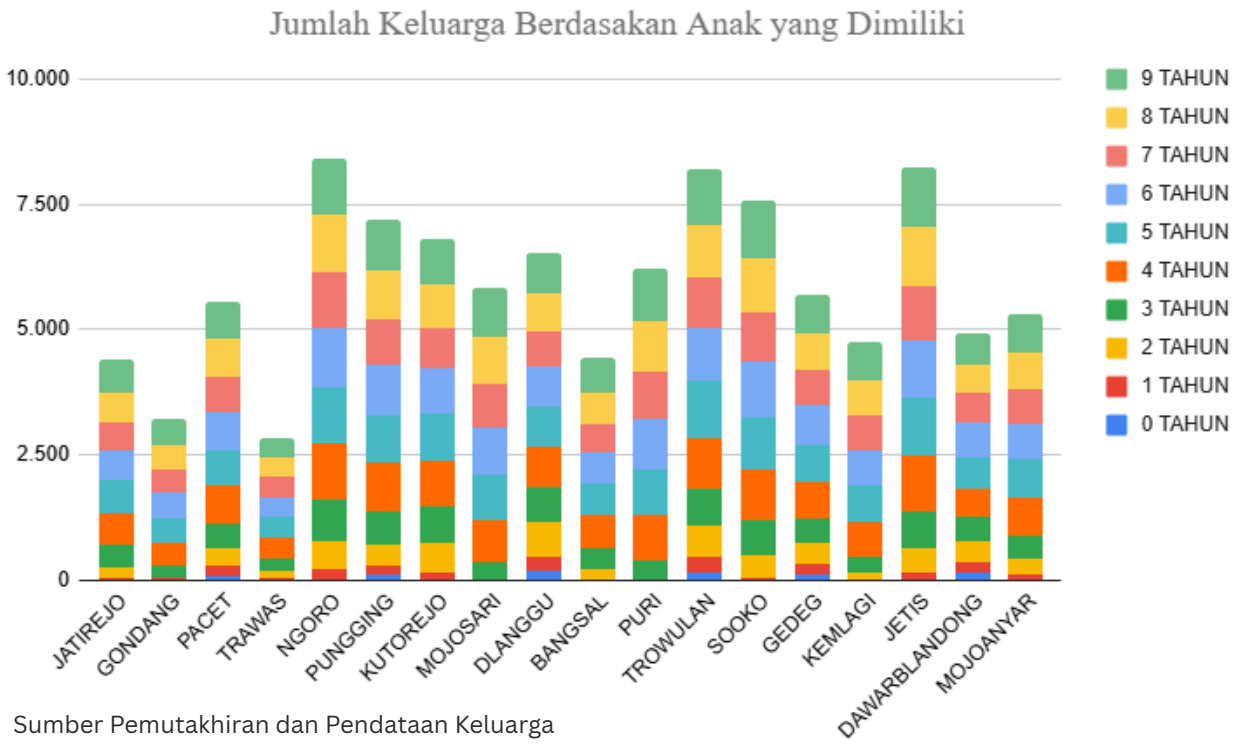

Sumber Pemutakhiran dan Pendataan Keluarga

Grafik 3 Jumlah Keluarga menurut Umur Anak yang Dimiliki

Data hasil pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2024 pada Grafik 3 menunjukkan bahwa di Kabupaten Mojokerto terdapat 92.978 keluarga yang memiliki anak usia 0 hingga 9 tahun. Analisis berdasarkan umur anak menunjukkan pola yang relatif merata dengan sedikit peningkatan jumlah pada usia anak 5 hingga 7 tahun.

Secara umum, jumlah keluarga terbanyak terdapat pada kelompok usia anak 5 tahun (14.723 keluarga), disusul usia 7 tahun (13.679 keluarga), dan 6 tahun (15.081 keluarga).

Kecamatan dengan jumlah keluarga terbanyak yang memiliki anak usia 0–9 tahun adalah Ngoro dengan jumlah anak 7.364 keluarga, kemudian Kecamatan Trowulan: 7.060 keluarga, lalu Kecamatan Jetis: 7.217 keluarga. Sementara itu, kecamatan dengan jumlah keluarga kurang pada kelompok ini adalah Kecamatan Gondang (2.965 keluarga), Kecamatan Trawas (2.565 keluarga), dan Kecamatan Kemlagi (4.278 keluarga).

Data ini penting untuk digunakan dalam perencanaan program-program yang menyasar anak-anak usia dini seperti:

- Pendidikan anak usia dini (PAUD)
- Imunisasi dan kesehatan balita
- Program Bina Keluarga Balita (BKB)
- Perencanaan kebutuhan layanan dasar, seperti posyandu dan fasilitas pendidikan dasar

Distribusi keluarga berdasarkan usia anak di Kabupaten Mojokerto menunjukkan potensi kebutuhan intervensi layanan dasar anak yang cukup besar, terutama pada kelompok usia pra-sekolah dan usia sekolah dasar awal.

JUMLAH KEPALA KELUARGA MENURUT PEKERJAAN

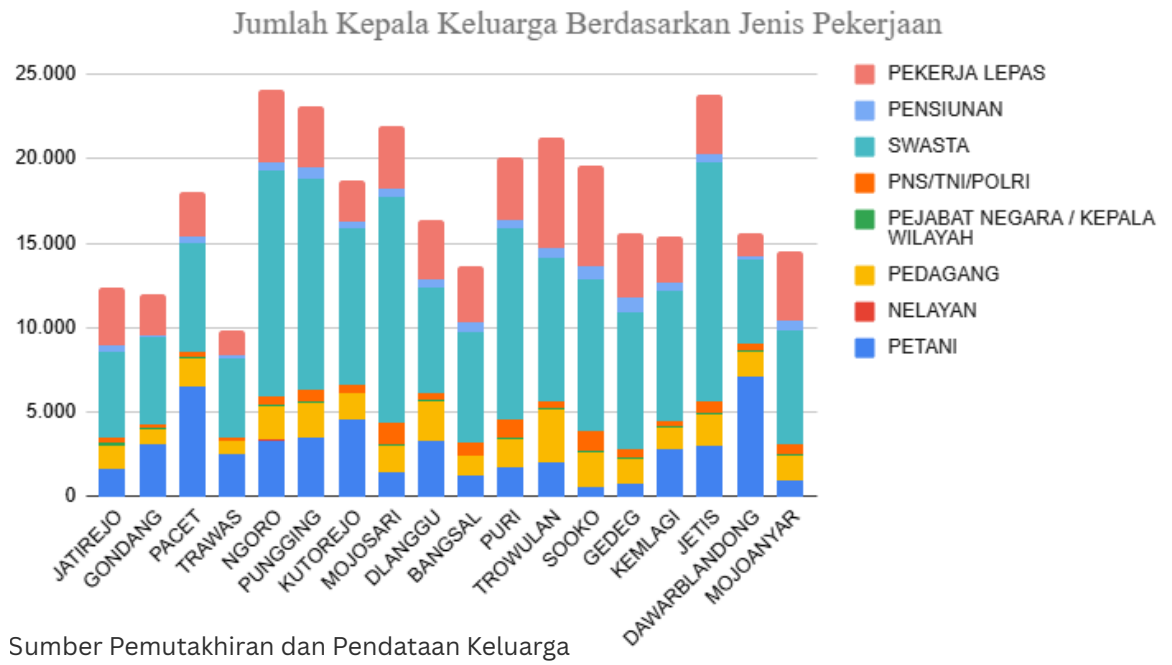

Sumber Pemutakhiran dan Pendataan Keluarga

Grafik 5 Jumlah Kepala Keluarga menurut Pekerjaan

Berdasarkan data pendataan keluarga dan pemutakhiran hingga tahun 2024 di Kabupaten Mojokerto, tercatat terdapat sebanyak 348.083 kepala keluarga yang tersebar di 18 kecamatan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 316.000 kepala keluarga diketahui memiliki pekerjaan, sementara 32.083 lainnya tidak bekerja. Jenis pekerjaan terbanyak yang dijalani oleh kepala keluarga adalah sebagai pekerja swasta sebanyak 153.116 orang (48,45%), disusul oleh pekerja lepas sebanyak 62.606 orang (19,82%), dan petani sebanyak 49.948 orang (15,8%). Sementara itu, jumlah kepala keluarga yang bekerja sebagai pegawai negeri atau TNI/Polri relatif lebih sedikit, masing-masing sebanyak 10.161 dan 1.650 orang.

Kecamatan dengan jumlah kepala keluarga terbanyak adalah Ngoro (26.554), Jetis (26.044), dan Pungging (25.435). Ketiganya juga mencatat jumlah pekerja yang tinggi, yaitu masing-masing sebanyak 24.056, 23.790, dan 23.145 orang. Pekerja di kecamatan-kecamatan ini didominasi oleh sektor swasta dan pekerja lepas. Sebaliknya, kecamatan dengan jumlah kepala keluarga dan pekerja paling sedikit adalah Trawas (10.682 kepala keluarga dan 9.800 pekerja), disusul oleh Dawarblandong dan Bangsal.

Dari sisi jenis pekerjaan, kecamatan Pacet dan Kutorejo menonjol dengan jumlah petani terbanyak, masing-masing sebanyak 5.622 dan 4.557 orang, menunjukkan dominasi sektor pertanian di wilayah tersebut. Sementara kecamatan Mojosari dan Sooko mencatat angka tertinggi pada kategori pekerja swasta, yaitu sebanyak 13.455 dan 10.898 orang. Hal ini mengindikasikan adanya konsentrasi sektor industri atau perdagangan yang lebih kuat di wilayah tersebut.

Mayoritas kepala keluarga di Kabupaten Mojokerto bekerja di sektor informal dan swasta. Pola sebaran jenis pekerjaan juga menunjukkan adanya perbedaan karakteristik ekonomi antar wilayah, di mana beberapa kecamatan lebih bergantung pada sektor pertanian, sedangkan lainnya lebih kuat di sektor industri dan jasa. Informasi ini dapat menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan program penguatan ekonomi keluarga yang sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.

JUMLAH KEPALA KELUARGA MENURUT PENDIDIKAN TERAKHIR

Berdasarkan data pendataan keluarga dan pemutakhiran hingga tahun 2024 di Kabupaten Mojokerto, terlihat bahwa tingkat pendidikan kepala keluarga masih didominasi oleh lulusan Sekolah Dasar (SD) atau sederajat. Dari total 348.087 kepala keluarga, sebanyak 119.068 (34,20%) tercatat hanya menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SD. Sementara itu, kepala keluarga yang telah menamatkan pendidikan hingga tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 76.133 orang (21,88%) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 105.396 orang (30,28%).

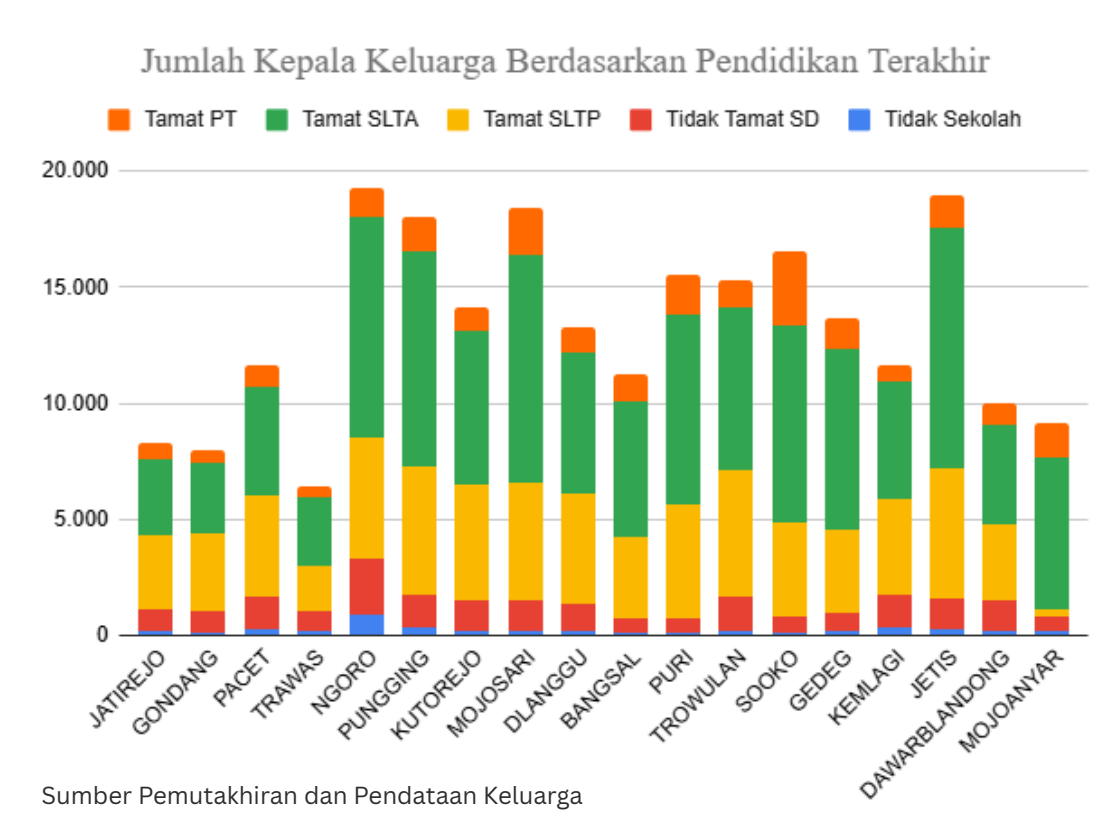

Sumber Pemutakhiran dan Pendataan Keluarga

Grafik 6 Jumlah Kepala Keluarga menurut Pendidikan Terakhir

Masih terdapat 20.811 kepala keluarga (5,98%) yang belum tamat SD, dan bahkan 4.050 orang (1,16%) tidak pernah bersekolah sama sekali. Adapun kepala keluarga yang telah menyelesaikan pendidikan hingga tingkat pendidikan tinggi (perguruan tinggi) berjumlah 22.629 orang (6,5%).

Dari sisi wilayah, Kecamatan Jetis mencatat jumlah kepala keluarga tertinggi yaitu 26.045 orang, diikuti oleh Kecamatan Ngoro (26.555) dan Pungging (25.436). Kecamatan Jetis juga mencatat jumlah lulusan SMA terbanyak, yaitu 7.042 orang, sedangkan Kecamatan Puri menempati peringkat tertinggi untuk jumlah lulusan perguruan tinggi dengan 1.696 kepala keluarga. Sebaliknya, Kecamatan Dawarblandong dan Trawas mencatat angka lulusan perguruan tinggi yang relatif lebih rendah dibandingkan kecamatan lainnya.

Secara umum, data ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar kepala keluarga telah menyelesaikan pendidikan dasar, masih terdapat tantangan dalam peningkatan akses dan partisipasi pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan data ini untuk merancang program peningkatan kualitas sumber daya manusia, seperti pelatihan keterampilan kerja bagi kepala keluarga dengan pendidikan rendah serta pemberian beasiswa atau dukungan pendidikan kepada generasi penerus keluarga tersebut.

JUMLAH ANAK UMUR 7-24 TAHUN MENURUT STATUS PENDIDIKAN

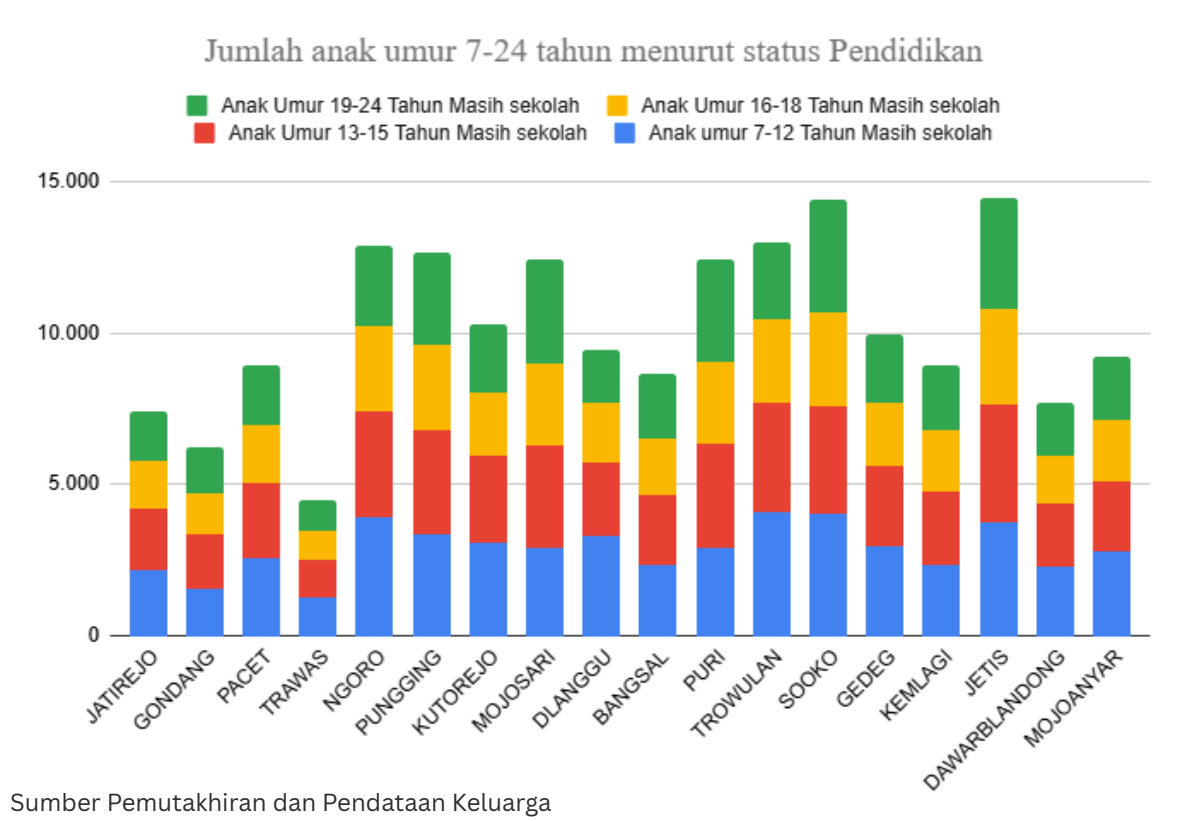

Sumber Pemutakhiran dan Pendataan Keluarga

Grafik 7 Jumlah Anak Umur 7-24 Tahun menurut Status Pendidikan

Berdasarkan data pendataan keluarga dan pemutakhiran tahun 2024 di wilayah Kabupaten, terlihat tingkat partisipasi pendidikan anak usia 7–24 tahun menunjukkan capaian yang cukup baik, meskipun masih terdapat sejumlah anak yang tidak bersekolah.

Dari total 94.263 anak usia 7–12 tahun, sebanyak 51.840 anak (sekitar 55%) masih bersekolah, sedangkan 42.423 anak (sekitar 45%) tidak bersekolah. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun mayoritas anak pada kelompok usia ini mengikuti pendidikan dasar, proporsi anak yang tidak bersekolah masih tergolong tinggi dan perlu menjadi perhatian khusus. Kecamatan Ngoro mencatat jumlah anak usia 7–12 tahun tertinggi (7.323 anak), di mana 3.194 anak di antaranya tidak bersekolah.

Untuk kelompok usia 13–15 tahun (usia SMP), dari total 93.566 anak, sebanyak 51.316 anak (54,9%) masih bersekolah, sedangkan 42.250 anak (45,1%) tidak bersekolah. Angka ini menunjukkan tren yang hampir sama dengan kelompok usia sebelumnya, dengan hampir separuh anak usia SMP yang tidak melanjutkan pendidikannya. Kecamatan dengan jumlah anak SMP terbanyak adalah Ngoro dan Trowulan, dengan jumlah yang tidak bersekolah cukup tinggi pula.

Sementara itu, pada kelompok usia 16–18 tahun (usia SMA), dari total 42.116 anak, terdapat 39.428 anak (93,6%) yang masih bersekolah dan hanya 2.688 anak (6,4%) yang tidak bersekolah. Ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam partisipasi pendidikan pada kelompok usia ini dibandingkan usia sebelumnya. Kecamatan Jetis dan Trowulan memiliki angka partisipasi yang tinggi, meskipun angka anak tidak sekolah di beberapa kecamatan seperti Ngoro dan Puri juga cukup menonjol.

Secara keseluruhan, walaupun partisipasi pendidikan pada usia remaja akhir cukup baik, data ini mengindikasikan adanya tantangan besar dalam mempertahankan partisipasi sekolah anak-anak di usia 7–15 tahun. Upaya intervensi yang lebih dini dan komprehensif diperlukan, termasuk kampanye pentingnya pendidikan, dukungan ekonomi bagi keluarga kurang mampu, serta perbaikan akses dan kualitas pendidikan dasar di daerah-daerah dengan angka ketidaksekolahan tinggi.

JUMLAH LANSIA 60+ TAHUN MENURUT KELOMPOK UMUR

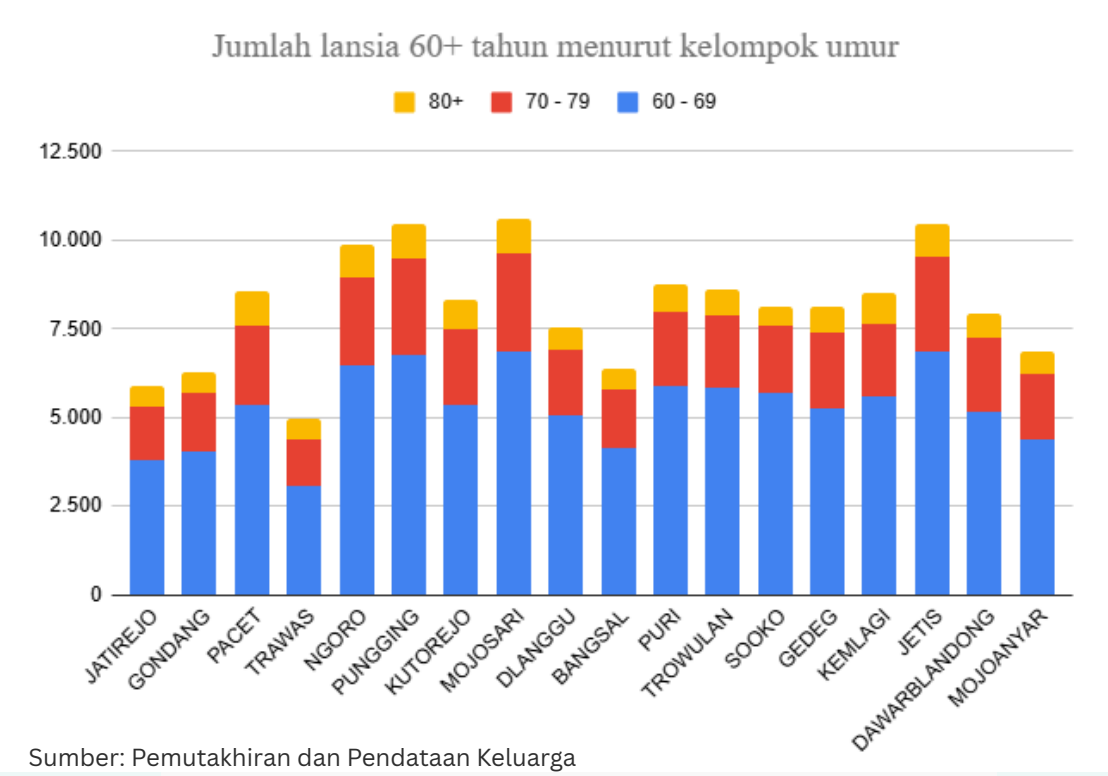

Sumber: Pemutakhiran dan Pendataan Keluarga

Grafik 8 Jumlah Lansia 60+ Tahun menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur

Berdasarkan data pendataan keluarga dan pemutakhiran tahun 2024 di wilayah Kabupaten, jumlah lansia usia 60 tahun ke atas tercatat sebanyak 146.216 jiwa, yang terbagi dalam tiga kelompok umur: usia 60–69 tahun, 70–79 tahun, dan 80 tahun ke atas. Sebagian besar lansia berada pada kelompok usia 60–69 tahun sebanyak 95.551 jiwa (65,3%), disusul oleh kelompok 70–79 tahun sebanyak 37.162 jiwa (25,4%), dan kelompok usia 80 tahun ke atas sebanyak 13.503 jiwa (9,2%).

Dari sisi jenis kelamin, jumlah lansia perempuan lebih banyak dibandingkan lansia laki-laki. Tercatat terdapat 74.351 lansia perempuan dan 71.865 lansia laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan cenderung memiliki angka harapan hidup lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Hal ini konsisten di hampir seluruh kecamatan. Misalnya, di Kecamatan Ngoro terdapat 5.178 lansia perempuan dibandingkan 4.679 lansia laki-laki, dan di Kecamatan Jetis terdapat 5.165 lansia perempuan dibandingkan 5.272 lansia laki-laki meskipun Kecamatan Jetis menjadi salah satu pengecualian dengan jumlah lansia laki-laki sedikit lebih banyak.

Kecamatan yang memiliki jumlah lansia terbanyak adalah Kecamatan Jetis (10.437 orang), Kecamatan Mojosari (10.626 orang), dan Kecamatan Pungging (10.454 orang). Sedangkan jumlah lansia paling sedikit tercatat di Kecamatan Trawas (4.963 orang).

Jika ditinjau berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin, lansia perempuan usia 80+ tercatat sebanyak 7.879 orang, jauh lebih banyak dibandingkan lansia laki-laki pada kelompok umur yang sama yang hanya 5.624 orang. Fakta ini kembali memperkuat bahwa perempuan cenderung memiliki umur lebih panjang.

Secara umum, data ini menunjukkan bahwa proporsi penduduk lansia di kabupaten ini cukup signifikan, khususnya pada kelompok usia 60–69 tahun. Ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam perencanaan layanan sosial, kesehatan, serta dukungan kesejahteraan bagi lansia, mengingat kelompok ini akan terus bertambah seiring waktu. Perbedaan jumlah antara laki-laki dan perempuan juga perlu diperhatikan dalam penyediaan layanan yang responsif gender.

INDIKATOR
KELUARGA BERENCANA

JUMLAH WANITA MENURUT UMUR KAWIN PERTAMA

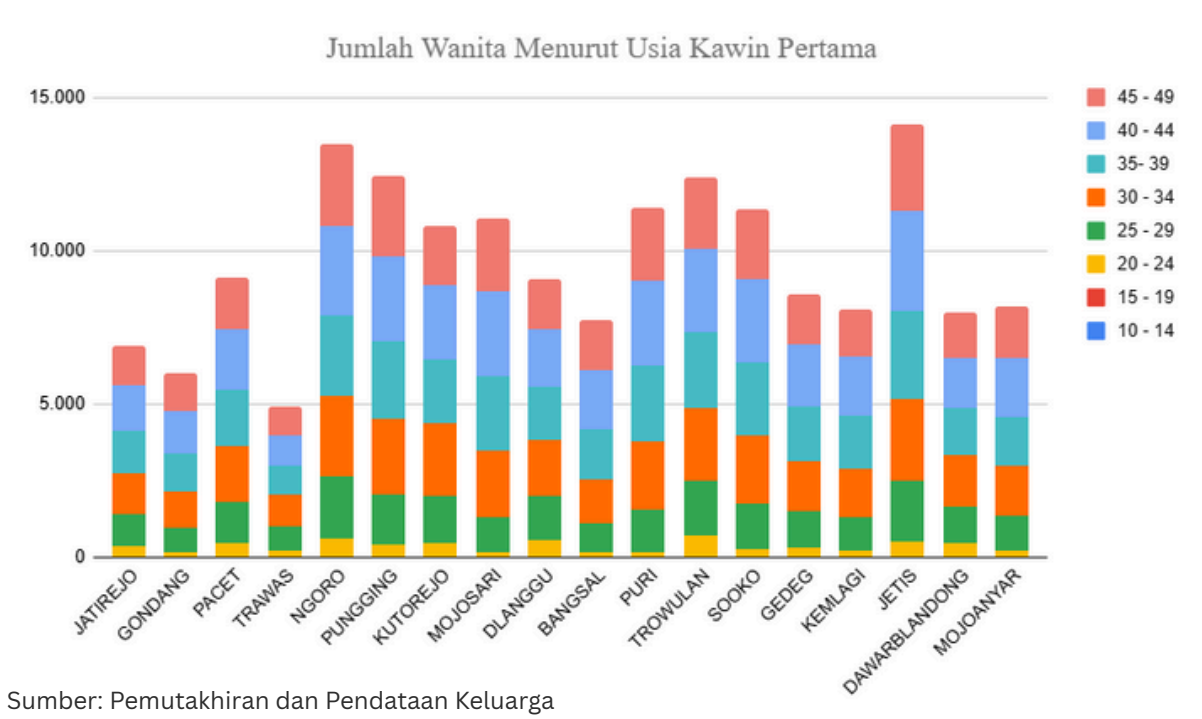

Sumber: Pemutakhiran dan Pendataan Keluarga

Grafik 9 Jumlah Wanita menurut Umur Kawin Pertama

Berdasarkan data hasil pendataan keluarga di wilayah Kabupaten Mojokerto, tercatat sebanyak 173.526 wanita kawin berusia 10–49 tahun. Mayoritas dari mereka berada dalam kelompok usia 30–34 tahun (35.225 orang), 40–44 tahun (39.591 orang), dan 45–49 tahun (34.214 orang), yang menunjukkan bahwa sebagian besar wanita kawin berada dalam rentang usia dewasa matang.

Kelompok usia termuda, yakni 10–14 tahun, hanya menyumbang 5 orang wanita kawin, sedangkan kelompok 15–19 tahun berjumlah 179 orang. Meskipun jumlahnya kecil, hal ini tetap perlu menjadi perhatian karena menunjukkan bahwa pernikahan usia dini masih terjadi di beberapa wilayah.

Dari segi sebaran kecamatan, Kecamatan Jetis (14.123 orang), Kecamatan Ngoro (13.482 orang), dan Kecamatan Trowulan (12.396 orang) merupakan kecamatan dengan jumlah wanita kawin tertinggi. Sedangkan Kecamatan Trawas (4.903 orang) memiliki jumlah wanita kawin paling sedikit dibandingkan kecamatan lainnya.

Kelompok usia subur utama, yaitu 25–29 tahun dan 30–34 tahun, masing-masing menyumbang 23.780 orang dan 35.225 orang, yang mencerminkan potensi tinggi untuk program-program kependudukan, kesehatan ibu dan anak, serta program Keluarga Berencana (KB). Sementara kelompok usia 35–39 tahun dan 40–44 tahun juga cukup signifikan dan perlu diperhatikan dari sisi kesehatan reproduksi dan layanan kesehatan lanjut usia reproduksi.

Secara umum, data ini menggambarkan bahwa wanita kawin di kabupaten ini tersebar merata dalam kelompok usia produktif dan reproduktif. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah dan instansi terkait untuk merancang program-program perlindungan perempuan, kesehatan keluarga, serta edukasi pernikahan usia ideal guna menekan angka pernikahan dini dan menjaga kualitas hidup keluarga di masa mendatang.

JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR (PUS) MENURUT UMUR KAWIN PERTAMA

Jumlah pasangan usia subur (PUS) yang tercatat di wilayah kabupaten dalam tahun 2024 mencapai 173.521 pasangan. Dari data tersebut, terlihat variasi jumlah anak yang telah dilahirkan dan yang masih hidup di masing-masing kecamatan. Kecamatan dengan jumlah PUS terbanyak adalah Kecamatan Jetis dengan 14.123 pasangan, disusul Kecamatan Ngoro sebanyak 13.481 pasangan, dan Kecamatan Pungging dengan 12.420 pasangan. Di sisi lain, kecamatan seperti Kecamatan Trawas dan Kecamatan Dawarblandong menunjukkan angka PUS yang lebih rendah, masing-masing hanya 4.903 dan 7.986 pasangan.

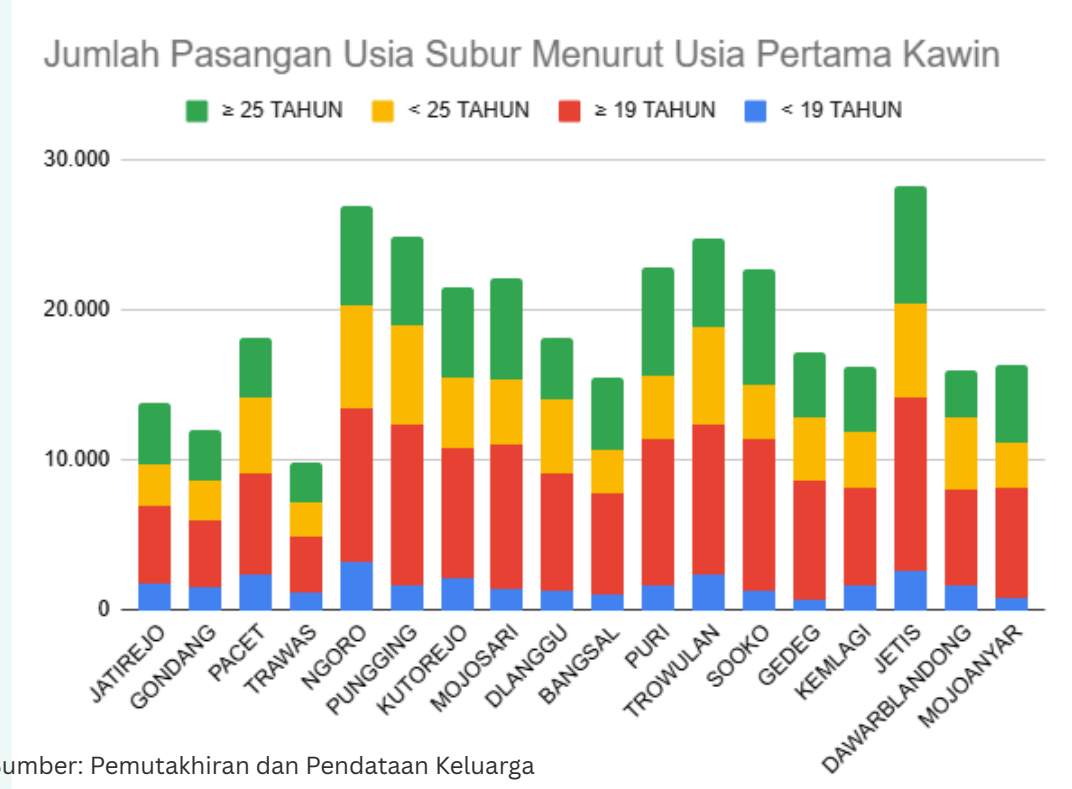

Sumber: Pemutakhiran dan Pendataan Keluarga

Grafik 10 Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) menurut Umur Kawin Pertama

Jika dilihat dari jumlah anak yang telah dilahirkan, mayoritas PUS berada pada kelompok dengan dua anak, yaitu sebanyak 80.210 pasangan. Jumlah ini mendukung tren “dua anak cukup” yang menjadi slogan nasional dalam program KB. Kelompok dengan satu anak tercatat sebanyak 55.784 pasangan, sedangkan yang belum memiliki anak sebanyak 12.528. Hanya 25.001 pasangan yang memiliki lebih dari dua anak, menunjukkan bahwa praktik pengendalian jumlah anak mulai menunjukkan hasil positif di tingkat masyarakat.

Dalam kategori anak yang masih hidup, pola distribusinya relatif serupa. Sebanyak 80.263 pasangan memiliki dua anak yang masih hidup, diikuti oleh 56.518 dengan satu anak yang masih hidup, dan 12.938 pasangan yang tidak memiliki anak hidup. Sementara itu, 23.802 pasangan tercatat memiliki lebih dari dua anak yang masih hidup. Konsistensi antara jumlah anak lahir hidup dan anak masih hidup juga bisa menunjukkan bahwa tingkat kematian anak di wilayah ini relatif rendah, atau paling tidak tidak jauh berbeda dari angka kelahiran.

Distribusi data juga menunjukkan beberapa hal menarik. Misalnya, Kecamatan Jetis yang memiliki jumlah PUS tertinggi juga mencatat jumlah tertinggi untuk pasangan dengan dua anak lahir hidup, yaitu 6.245 pasangan. Di sisi lain, Kecamatan Dawarblandong, meskipun memiliki jumlah PUS yang lebih sedikit, menunjukkan penyebaran jumlah anak yang cukup beragam, termasuk pasangan dengan lebih dari dua anak. Temuan ini penting sebagai dasar perencanaan intervensi program kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, khususnya dalam memberikan edukasi yang tepat sasaran untuk menjaga keseimbangan populasi dan meningkatkan kualitas hidup keluarga.

JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR (PUS) MENURUT ANAK LAHIR PERTAMA HIDUP DAN MASIH HIDUP

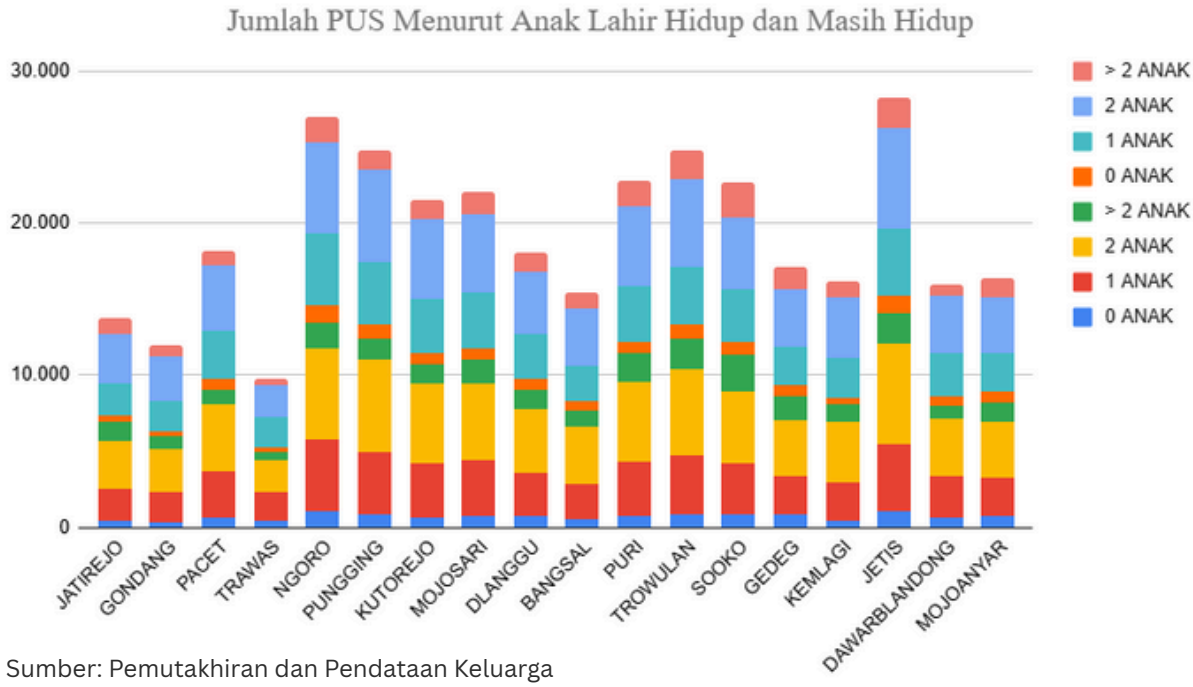

Sumber: Pemutakhiran dan Pendataan Keluarga

Grafik 11 Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) menurut Anak Lahir Pertama Hidup dan Masih Hidup

Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 128.772 pasangan usia subur (PUS) di wilayah kabupaten Mojoketro yang menjadi peserta program Keluarga Berencana (KB) dengan menggunakan metode kontrasepsi modern. Metode ini terdiri dari beberapa jenis seperti MOW (Metode Operasi Wanita), MOP (Metode Operasi Pria), IUD, implan, suntik, pil, kondom, dan MAL (Metode Amenore Laktasi). Dari jumlah tersebut, metode suntik menjadi pilihan paling populer dengan 83.807 pengguna, diikuti oleh pil dengan 15.623 pengguna, dan implant sebanyak 8.848 pengguna.

Dari seluruh kecamatan yang tercatat, Kecamatan Jetis menempati posisi teratas dalam hal jumlah peserta KB modern, yaitu sebanyak 10.234 pasangan, disusul Kecamatan Ngoro dengan 10.027 pasangan, dan Kecamatan Pungging sebanyak 9.419 pasangan. Ini menunjukkan keberhasilan sosialisasi KB di wilayah-wilayah tersebut, yang didukung oleh layanan kesehatan yang relatif memadai.

Distribusi penggunaan alat kontrasepsi modern menunjukkan preferensi yang jelas terhadap metode suntik di hampir semua kecamatan. Sebagai contoh, di Kecamatan Mojosari terdapat 5.729 pengguna suntik, sementara metode lainnya jauh lebih sedikit, seperti pil (850) dan IUD (1.158). Demikian pula di Kecamatan Jetis, suntik digunakan oleh 6.460 pasangan, menjadikannya metode paling dominan. Hal ini menunjukkan bahwa metode suntik dianggap lebih praktis dan efektif oleh masyarakat, meskipun perlu kontrol berkala.

Namun demikian, penggunaan metode permanen seperti MOW (7.153 pasangan) dan MOP (180 pasangan) masih relatif rendah. Ini bisa mengindikasikan adanya keterbatasan akses, minimnya informasi atau sosialisasi tentang metode ini, serta preferensi masyarakat untuk menggunakan metode yang reversible. Menariknya, metode tradisional seperti MAL masih digunakan meskipun sangat kecil jumlahnya, yaitu hanya 75 pasangan, menunjukkan bahwa sebagian kecil masyarakat masih mempertahankan cara alami dalam mengatur kehamilan.

JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR (PUS) PESERTA KB MENURUT METODE KONTRASEPSI MODERN

Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 128.772 pasangan usia subur (PUS) di wilayah Kabupaten Mojokerto yang menjadi peserta program Keluarga Berencana (KB) dengan menggunakan metode kontrasepsi modern. Metode ini terdiri dari beberapa jenis seperti MOW (Metode Operasi Wanita), MOP (Metode Operasi Pria), IUD, implan, suntik, pil, kondom, dan MAL (Metode Amenore Laktasi). Dari jumlah tersebut, metode suntik menjadi pilihan paling populer dengan 83.807 pengguna, diikuti oleh pil dengan 15.623 pengguna, dan implan sebanyak 8.848 pengguna.

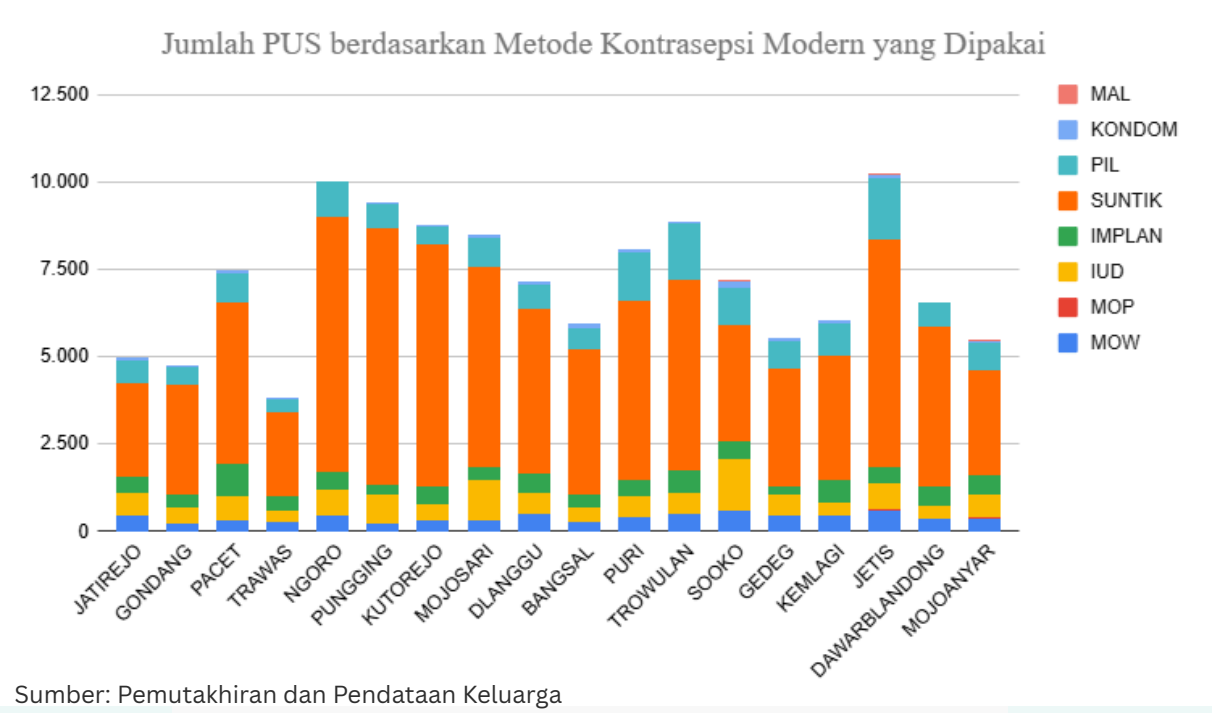

Sumber: Pemutakhiran dan Pendataan Keluarga

Grafik 12 Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB menurut Metode Kontrasepsi Modern

Dari seluruh kecamatan yang tercatat, Kecamatan Jetis menempati posisi teratas dalam hal jumlah peserta KB modern, yaitu sebanyak 10.234 pasangan, disusul Kecamatan Ngoro dengan 10.027 pasangan, dan Kecamatan Pungging sebanyak 9.419 pasangan. Ini menunjukkan keberhasilan sosialisasi KB di wilayah-wilayah tersebut, yang didukung oleh layanan kesehatan yang relatif memadai. Sementara itu, kecamatan seperti Kecamatan Trawas dan Kecamatan Dawarblandong menunjukkan jumlah peserta yang lebih sedikit, masing-masing sebanyak 3.824 dan 3.573 pasangan.

Distribusi penggunaan alat kontrasepsi modern menunjukkan preferensi yang jelas terhadap metode suntik di hampir semua kecamatan. Sebagai contoh, di Kecamatan Mojosari terdapat 5.729 pengguna suntik, sementara metode lainnya jauh lebih sedikit, seperti pil (850) dan IUD (1.158). Demikian pula di Kecamatan Jetis, suntik digunakan oleh 6.460 pasangan, menjadikannya metode paling dominan. Hal ini menunjukkan bahwa metode suntik dianggap lebih praktis dan efektif oleh masyarakat, meskipun perlu kontrol berkala.

Namun demikian, penggunaan metode permanen seperti MOW (7.153 pasangan) dan MOP (180 pasangan) masih relatif rendah. Ini bisa mengindikasikan adanya keterbatasan akses, minimnya informasi atau sosialisasi tentang metode ini, serta preferensi masyarakat untuk menggunakan metode yang reversible. Menariknya, metode tradisional seperti MAL masih digunakan meskipun sangat kecil jumlahnya, yaitu hanya 75 pasangan, menunjukkan bahwa sebagian kecil masyarakat masih mempertahankan cara alami dalam mengatur kehamilan.

JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR (PUS) MENURUT STATUS *UNMETNEED*

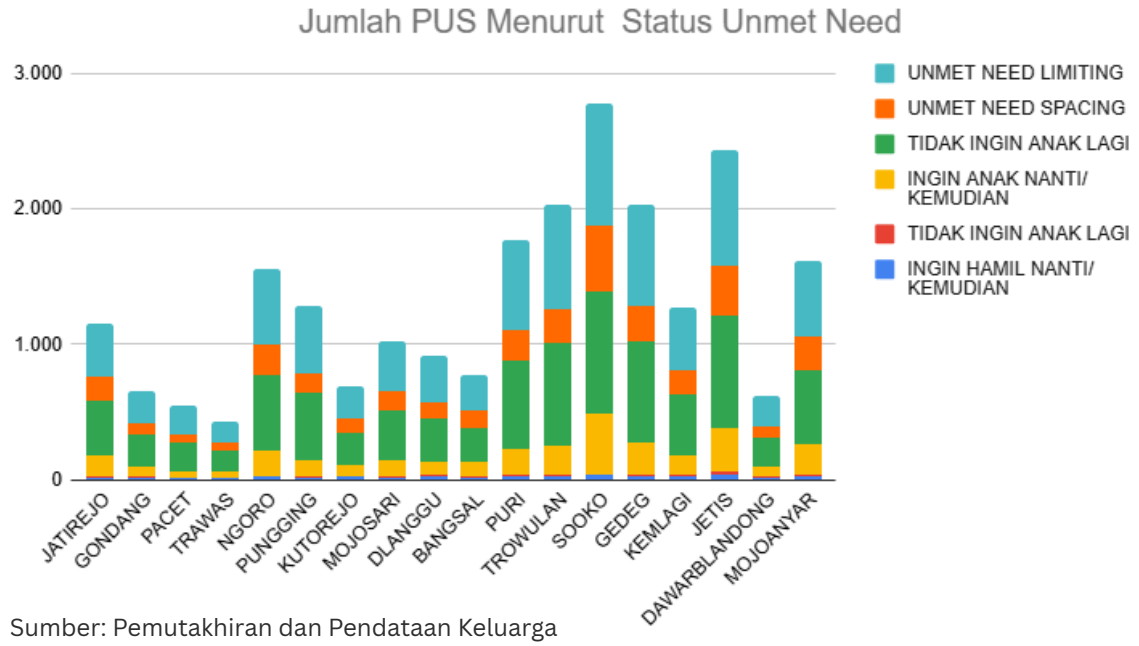

Sumber: Pemutakhiran dan Pendataan Keluarga

Grafik 13 Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) menurut Status *Unmetneed*

Pada tahun 2024, jumlah total Pasangan Usia Subur (PUS) yang terdata dalam pemutakhiran pendataan keluarga di wilayah kabupaten adalah sebanyak 173.521 pasangan. Dari jumlah tersebut, terdapat 11.786 pasangan (sekitar 6,8%) yang masuk dalam kategori *unmetneed*, yaitu pasangan yang sebenarnya ingin menunda atau tidak ingin memiliki anak lagi, namun belum menggunakan alat atau metode kontrasepsi modern. *unmetneed* ini terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu *unmetneed spacing* (ingin menjarakkan kehamilan) sebanyak 3.328 pasangan, dan *unmetneed limiting* (tidak ingin anak lagi) sebanyak 8.458 pasangan.

Dari sisi sebaran wilayah, Kecamatan Jetis mencatat jumlah *unmetneed* tertinggi dengan 884 pasangan, terdiri dari 38 pasangan *unmetneed spacing* dan 846 pasangan *unmetneed limiting*. Hal serupa juga terlihat di Kecamatan Trowulan, dengan 1.013 pasangan *unmetneed*, yang merupakan jumlah tertinggi di seluruh kecamatan, terdiri dari 241 pasangan *unmetneed spacing* dan 772 pasangan *unmetneed limiting*. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah PUS di daerah-daerah tersebut tergolong tinggi, tingkat pemanfaatan kontrasepsi masih belum optimal untuk menekan risiko kehamilan yang tidak diinginkan.

Secara umum, sebagian besar PUS yang tidak ikut program KB menyatakan tidak ingin memiliki anak lagi, baik dalam kondisi sedang hamil maupun tidak hamil. Tercatat 8.296 pasangan PUS tidak hamil dan tidak ingin anak lagi, serta 162 pasangan sedang hamil namun juga tidak menginginkan anak lagi. Hal ini menggambarkan adanya kebutuhan akan edukasi dan layanan KB yang lebih intensif untuk kelompok ini agar kehamilan yang tidak direncanakan dapat dicegah.

Fakta lainnya menunjukkan bahwa jumlah PUS yang masih ingin memiliki anak namun belum ikut program KB juga cukup signifikan, dengan 2.923 pasangan menyatakan ingin menunda kehamilan namun belum menjadi peserta KB. Hal ini merupakan peluang strategis untuk meningkatkan cakupan program KB melalui pendekatan promotif dan preventif. Oleh karena itu, penting bagi pemangku kebijakan di tingkat kabupaten untuk memperkuat intervensi KB melalui peningkatan aksesibilitas layanan, penyuluhan, serta ketersediaan alat kontrasepsi yang tepat sasaran.

JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR (PUS) MENURUT INFORMASI METODE KB YANG DIDAPATKAN

Hasil pendataan keluarga menunjukkan bahwa dari total 129.039 Pasangan Usia Subur (PUS) yang merupakan peserta KB dan pernah ikut program KB, sebagian besar telah memperoleh informasi mengenai metode kontrasepsi. Secara keseluruhan, 123.370 PUS (95,6%) telah mendapatkan informasi mengenai jenis-jenis alat/obat/cara KB kontrasepsi modern, 115.701 PUS (89,6%) memperoleh informasi tentang efek samping dari metode KB, dan 114.288 PUS (88,6%) mengetahui apa yang harus dilakukan jika mengalami efek samping dari metode KB.

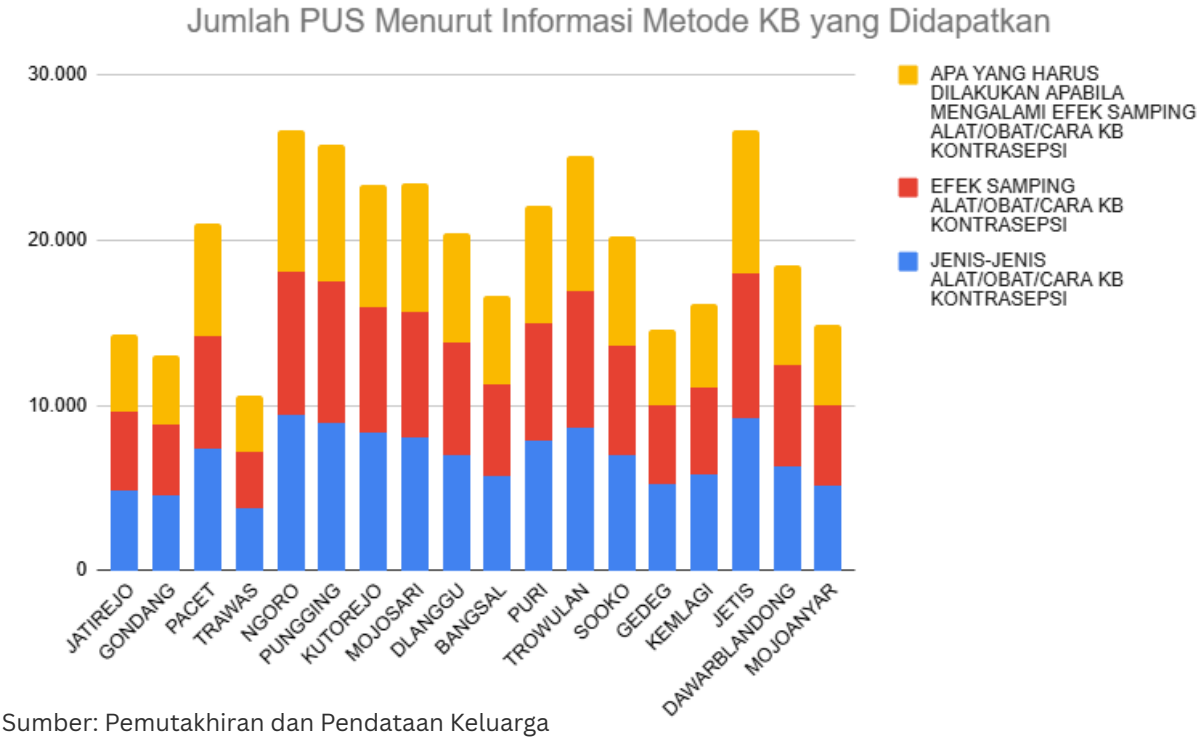

Sumber: Pemutakhiran dan Pendataan Keluarga

Grafik 14 Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) menurut Informasi Metode KB yang didapatkan

Dari sisi distribusi wilayah, Kecamatan Jetis menjadi yang tertinggi dalam jumlah PUS yang memperoleh informasi, dengan 9.247 PUS mengetahui jenis-jenis alat KB, 8.753 memahami efek samping, dan 8.605 mengetahui langkah penanganannya. Hal ini menunjukkan bahwa cakupan edukasi KB di kecamatan ini relatif tinggi. Sebaliknya, Kecamatan Trawas menjadi salah satu wilayah dengan cakupan informasi terendah, hanya 3.797 PUS mengetahui jenis KB, 3.401 tentang efek samping, dan 3.378 mengenai langkah penanganannya.

Meski secara umum informasi mengenai jenis alat KB telah menjangkau lebih dari 95% PUS peserta KB, masih terdapat kesenjangan dalam hal informasi penanganan efek samping. Selisih hampir 9.000 pasangan antara yang mengetahui jenis KB dengan yang mengetahui penanganan efek samping menunjukkan adanya potensi risiko dalam penggunaan kontrasepsi, terutama bagi pasangan yang belum siap menghadapi dampak negatif atau ketidaknyamanan dari alat/obat KB yang digunakan.

Keberhasilan program KB bukan hanya bergantung pada distribusi alat kontrasepsi, tetapi juga pada kualitas informasi yang diterima oleh pengguna. Oleh karena itu, penting bagi dinas terkait untuk memperkuat komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tentang KB, dengan fokus tidak hanya pada pengenalan metode, tetapi juga pemahaman efek samping dan tindakan penanganannya. Hal ini dapat membantu meningkatkan kepuasan pengguna KB dan menurunkan angka putus pakai kontrasepsi karena ketidaknyamanan atau ketidaktahuan.

JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR (PUS) BUKAN PESERTA KB MENURUT ALASAN TIDAK BER-KB

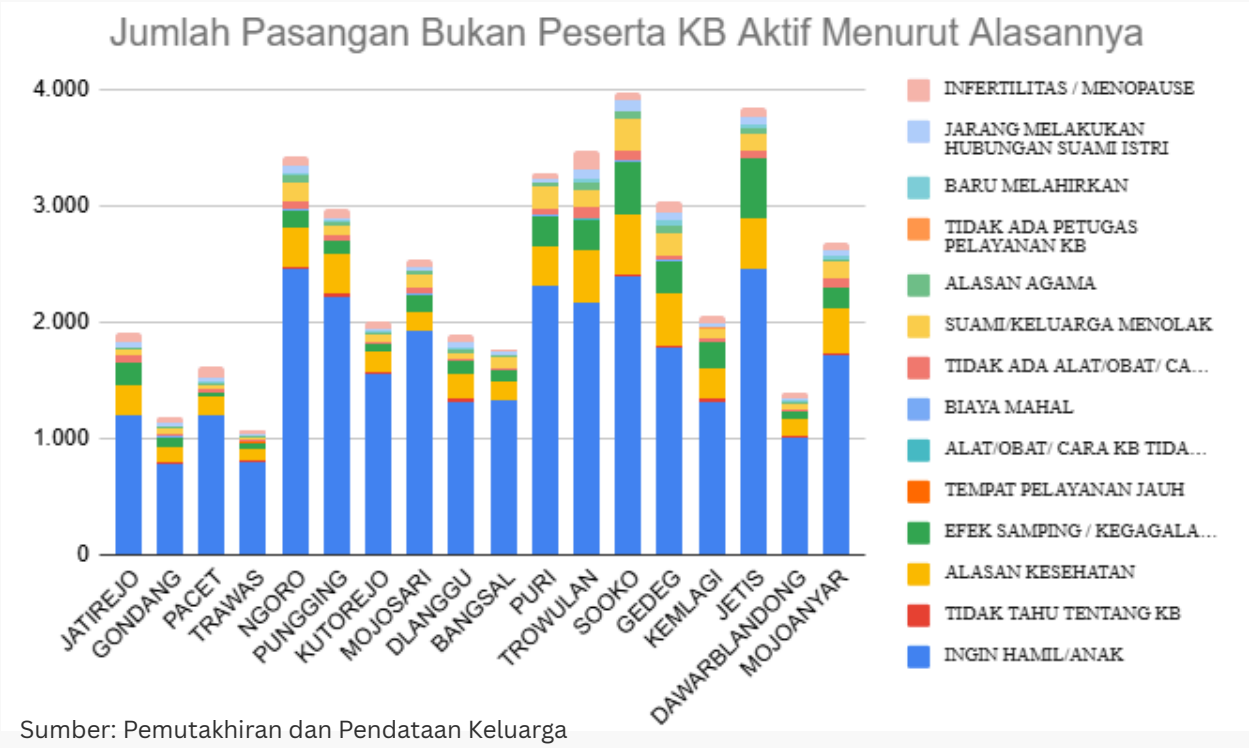

Sumber: Pemutakhiran dan Pendataan Keluarga

Grafik 15 Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Bukan Peserta KB menurut Alasan Tidak ber-KB

Pada hasil pendataan, terdapat 44.160 Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum menjadi peserta KB di wilayah kabupaten. Analisis terhadap alasan ketidakikutsertaan mereka mengungkapkan bahwa mayoritas, yaitu 29.958 PUS (67,9%), menyatakan alasan ingin hamil. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar PUS yang tidak mengikuti program KB melakukannya secara sadar karena sedang merencanakan kehamilan. Alasan terbesar kedua adalah karena alasan kesehatan, yang dikemukakan oleh 5.052 PUS (11,4%). Ini dapat mencerminkan kondisi medis yang menghambat penggunaan kontrasepsi tertentu, atau ketakutan terhadap dampak kesehatan yang dirasakan atau dipersepsikan.

Berikutnya, 3.280 PUS (7,4%) tidak ber-KB karena alasan efek samping atau kegagalan KB sebelumnya. Alasan ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan edukasi dan konseling KB agar PUS memahami bahwa berbagai metode KB memiliki karakteristik berbeda yang bisa disesuaikan dengan kondisi individu. Alasan teknis seperti alat/cara KB tidak tersedia (43 PUS), biaya mahal (61 PUS), dan tidak ada petugas pelayanan (4 PUS) mencerminkan bahwa hambatan akses masih ada, meskipun relatif kecil. Namun, 742 PUS (1,7%) menyatakan bahwa tidak ada alat/cara KB yang cocok, yang menegaskan pentingnya diversifikasi metode KB yang tersedia.

Kecamatan dengan jumlah PUS bukan peserta KB tertinggi adalah Kecamatan Jetis (3.844) dan Kecamatan Trowulan (3.473), sementara yang terendah adalah Kecamatan Dawarblandong (1.397). Kecamatan Jetis juga mencatat alasan tertinggi terkait efek samping (514 kasus), dan menjadi wilayah dengan tantangan edukasi atau penerimaan terhadap KB yang paling signifikan.

Program KB harus disesuaikan dengan realitas dan kebutuhan lokal. Pendekatan edukatif dan partisipatif sangat penting untuk menjawab alasan kesehatan, efek samping, serta resistensi dari pasangan atau keluarga. Sementara itu, strategi jangka pendek dapat difokuskan pada PUS yang sebenarnya bersedia ikut KB namun terkendala informasi, akses, atau ketidakcocokan metode. Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan peran kader dan fasilitas kesehatan untuk memperluas jangkauan dan kualitas pelayanan KB.

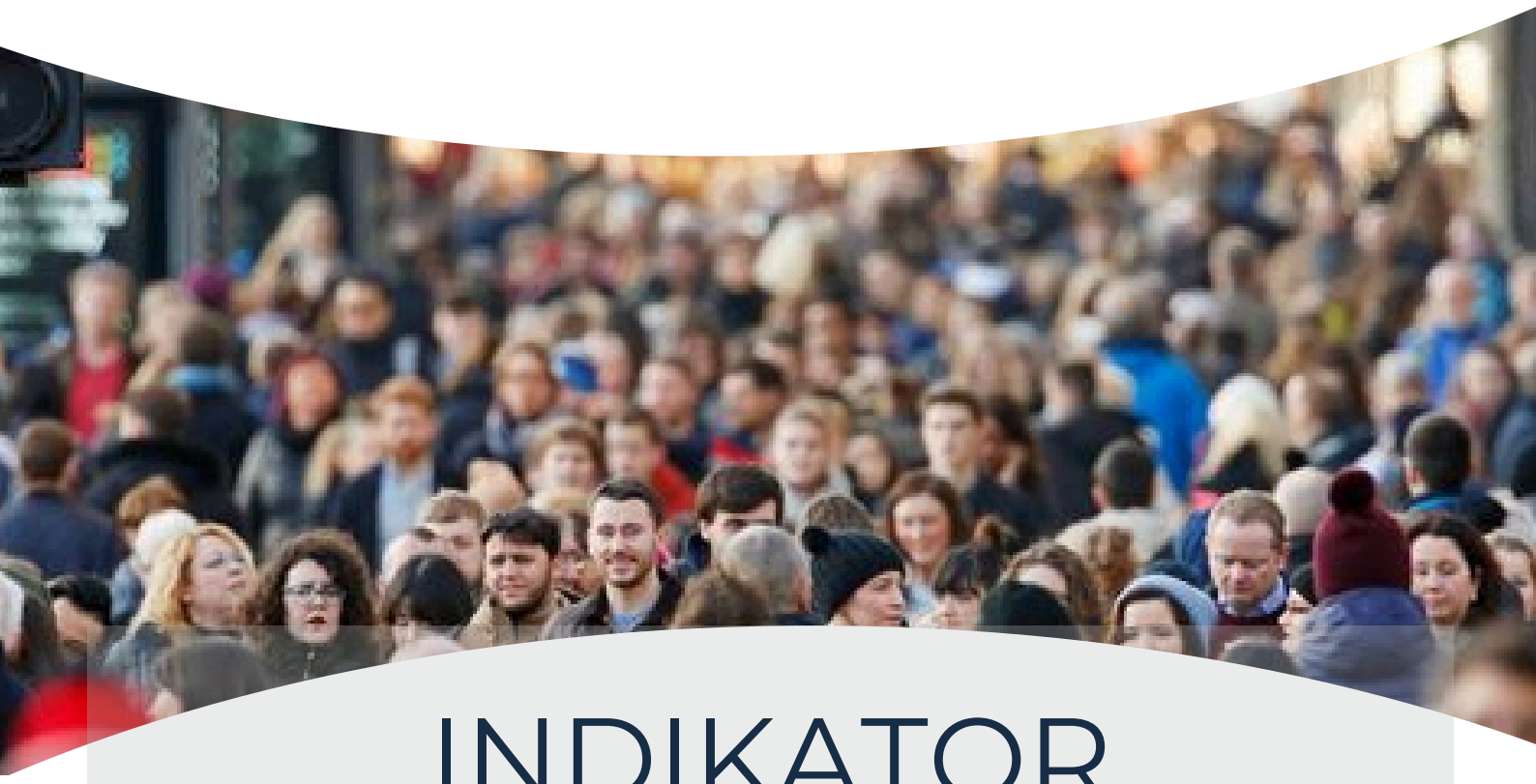

INDIKATOR
PEMBANGUNAN KELUARGA

JUMLAH KELUARGA MENURUT DIMENSI KETENTRAMAN

Tabel mengenai Jumlah Keluarga Menurut Dimensi Ketentraman hasil pendataan keluarga hingga tahun 2024 memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi sosial dan psikologis rumah tangga di wilayah kabupaten. Dari total 348.087 keluarga yang tercatat, sebagian besar menunjukkan kondisi ketentraman yang cukup baik. Sebanyak 344.874 keluarga (99%) tidak memiliki anggota keluarga yang terlibat dalam masalah hukum sebagai pelaku, dan hanya 3.785 keluarga (1,1%) yang memiliki anggota keluarga dalam status tahanan atau narapidana. Namun demikian, terdapat beberapa dimensi ketentraman yang menjadi sorotan dan memerlukan perhatian lebih lanjut.

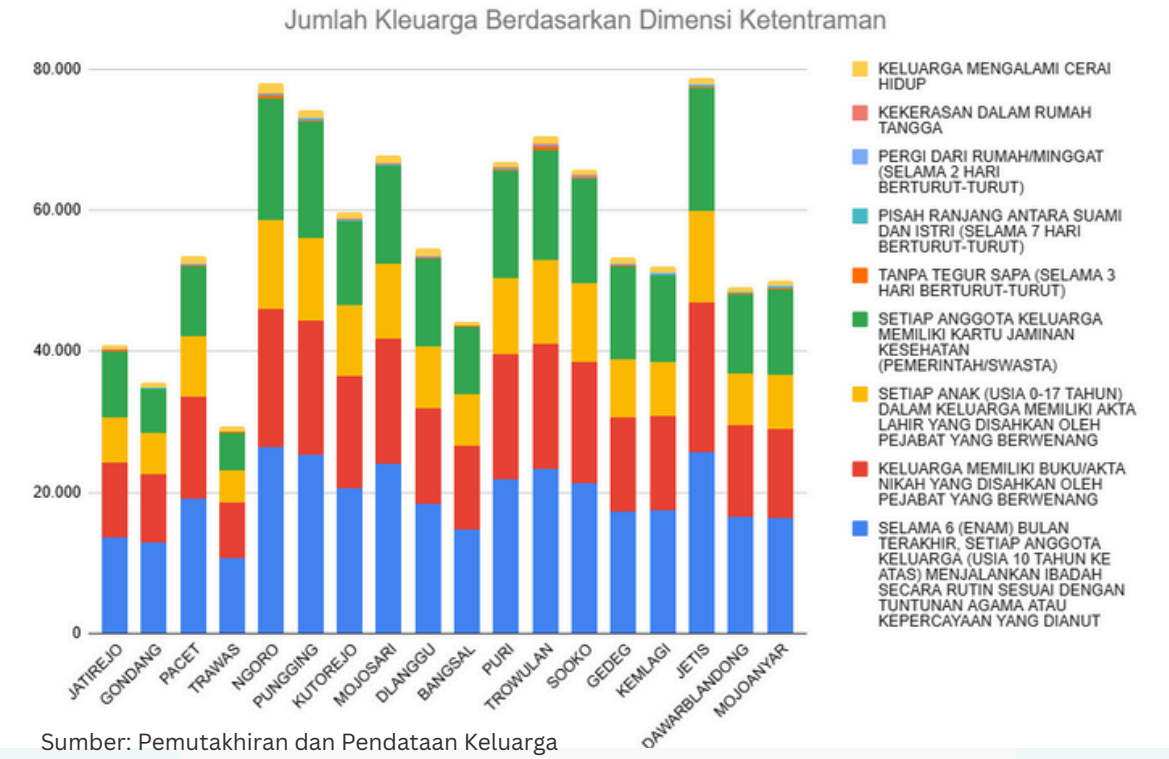

Sumber: Pemutakhiran dan Pendataan Keluarga

Grafik 16 Jumlah Keluarga menurut Dimensi Ketentraman

Salah satu persoalan signifikan adalah tingginya jumlah keluarga yang memiliki anak usia sekolah (7–18 tahun) namun tidak sedang bersekolah, yakni mencapai 79.249 keluarga (22,8%). Ini mencerminkan adanya tantangan dalam akses atau keberlangsungan pendidikan. Selain itu, sebanyak 124.515 keluarga (35,8%) dilaporkan tidak memiliki sumber penghasilan, mengindikasikan potensi kerentanan ekonomi yang tinggi. Dari sisi kesehatan dan sosial, tercatat 18.291 keluarga (5,3%) memiliki anggota penyandang disabilitas, serta 3.700 keluarga (1,1%) memiliki anggota dengan gangguan jiwa berat, keduanya memerlukan dukungan layanan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kondisi lain yang menjadi perhatian adalah kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh 15.843 keluarga (4,6%) dan konflik keluarga dalam dua minggu terakhir yang terjadi pada 1.380 keluarga (0,4%). Selain itu, 1.986 keluarga (0,6%) tercatat mengalami usaha bunuh diri oleh salah satu anggota keluarga dalam tujuh hari terakhir, yang menandakan urgensi penguatan layanan kesehatan mental di masyarakat. Sementara itu, akses terhadap layanan kesehatan masih menjadi kendala bagi 3.147 keluarga (0,9%).

Secara umum, meskipun mayoritas keluarga berada dalam kondisi yang relatif tenteram, isu-isu utama seperti ketidakberdayaan ekonomi, pendidikan anak yang tidak optimal, kekerasan dalam rumah tangga, dan masalah kesehatan mental menjadi tantangan nyata yang memerlukan perhatian lintas sektor. Intervensi terintegrasi melalui program sosial, pendidikan, ekonomi, dan kesehatan sangat penting untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh di wilayah ini.

JUMLAH KELUARGA MENURUT DIMENSI KEMANDIRIAN

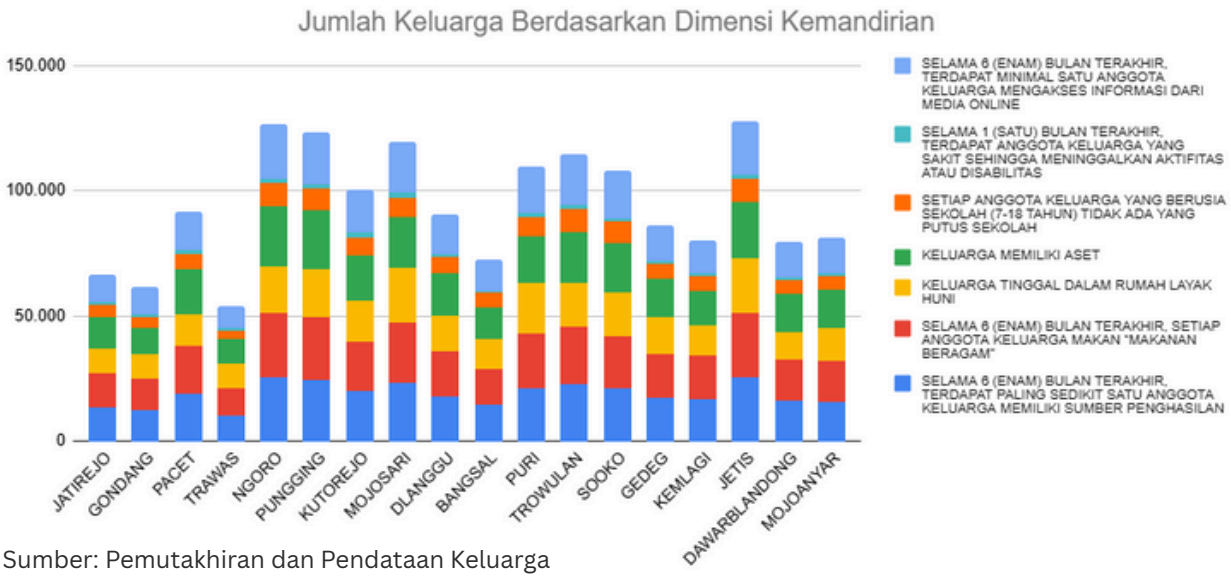

Sumber: Pemutakhiran dan Pendataan Keluarga

Grafik 17 Jumlah Keluarga menurut Dimensi Kemandirian

Tabel mengenai Jumlah Keluarga Menurut Dimensi Kemandirian berdasarkan hasil pendataan keluarga hingga tahun 2024 mencerminkan gambaran tingkat kemandirian ekonomi, pendidikan, dan akses informasi keluarga di wilayah kabupaten. Dari total 348.087 keluarga, mayoritas menunjukkan tingkat kemandirian yang cukup baik. Sebanyak 337.991 keluarga (97%) memiliki sumber penghasilan utama yang mencukupi kebutuhan pokok per bulan, sementara hanya 10.096 keluarga (3%) yang tidak memiliki penghasilan mencukupi.

Dalam aspek konsumsi, sebanyak 342.725 keluarga (98,4%) mengonsumsi makanan yang beragam dan cukup dalam dua kali sehari, sedangkan sisanya 5.302 keluarga (1,6%) tidak melakukannya. Sementara itu, 270.702 keluarga (77,8%) tinggal di rumah yang layak huni, namun 77.385 keluarga (22,2%) masih tinggal dalam kondisi rumah yang tidak layak, menunjukkan perlunya intervensi perumahan yang lebih kuat.

Dalam hal kepemilikan aset, 308.563 keluarga (88,6%) tercatat memiliki aset, tetapi 39.524 keluarga (11,4%) masih belum memilikinya, mencerminkan ketimpangan ekonomi yang masih terjadi.

Di sisi pendidikan, sebanyak 121.541 keluarga (34,9%) memiliki anggota yang tidak atau belum menyelesaikan pendidikan dasar atau tidak bisa membaca dan berhitung dengan lancar, yang menunjukkan masih rendahnya literasi dan pendidikan dasar di sebagian komunitas.

Sebanyak 182.407 keluarga (52,4%) memiliki anggota keluarga yang tidak memiliki jaminan kesehatan, mencerminkan tantangan besar dalam akses terhadap layanan kesehatan. Selain itu, keterlibatan dalam kegiatan masyarakat dan partisipasi informasi digital juga masih menjadi tantangan. Sebanyak 24.389 keluarga (7%) tidak memiliki anggota yang terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan selama enam bulan terakhir, dan 58.047 keluarga (16,7%) tidak mengakses media daring (internet), menunjukkan kesenjangan dalam partisipasi sosial dan literasi digital.

Secara keseluruhan, meskipun sebagian besar keluarga menunjukkan kemandirian yang memadai dalam hal ekonomi, konsumsi, dan tempat tinggal, masih terdapat tantangan signifikan dalam akses pendidikan, kepemilikan jaminan kesehatan, keterlibatan sosial, serta akses terhadap informasi digital. Upaya peningkatan literasi, penguatan sistem jaminan sosial, dan pemerataan akses infrastruktur dasar sangat diperlukan untuk mendukung ketahanan dan kemandirian keluarga di wilayah ini.

JUMLAH KELUARGA MENURUT DIMENSI KEBAHAGIAAN

Tabel Jumlah Keluarga Menurut Dimensi Kebahagiaan berdasarkan pemutakhiran data keluarga hingga tahun 2024 menyajikan informasi tentang kualitas interaksi, keharmonisan, serta partisipasi sosial keluarga di wilayah kabupaten. Dari total 348.087 keluarga, tercatat bahwa sebanyak 301.470 keluarga (86,6%) memiliki waktu untuk berinteraksi setiap hari antaranggota keluarga, sedangkan 36.982 keluarga (10,6%) tidak memiliki waktu yang cukup, dan 9.635 keluarga (2,8%) dalam kategori tidak berlaku.

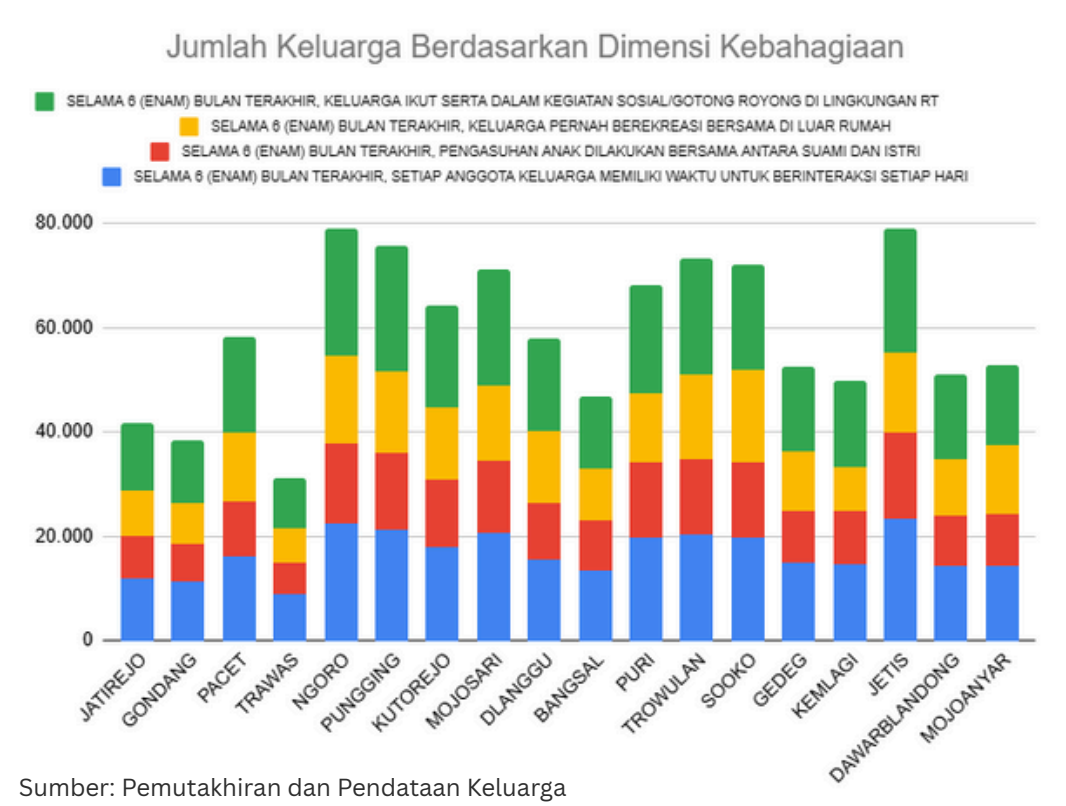

Sumber: Pemutakhiran dan Pendataan Keluarga

Grafik 18 Jumlah Keluarga menurut Dimensi Kebahagiaan

Dalam aspek keharmonisan rumah tangga, sebanyak 208.757 keluarga (59,9%) melakukan pengasuhan anak secara bersama antara suami dan istri, menunjukkan kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya peran ganda dalam pengasuhan. Namun, 75.034 keluarga (21,6%) masih belum menjalankan pengasuhan secara kolaboratif, dan 64.296 keluarga lainnya (18,5%) dikategorikan tidak berlaku.

Kegiatan rekreasi keluarga menjadi indikator penting lainnya. Sebanyak 228.071 keluarga (65,5%) melakukan rekreasi bersama di luar rumah selama enam bulan terakhir, menunjukkan keterlibatan keluarga dalam aktivitas kebersamaan. Namun demikian, angka keluarga yang tidak melakukan rekreasi masih cukup tinggi, yakni sebanyak 80.381 keluarga (23,1%), menunjukkan adanya keterbatasan akses waktu, ekonomi, atau prioritas terhadap aktivitas ini.

Aspek terakhir terkait partisipasi dalam kegiatan sosial menunjukkan capaian yang menggembirakan. Sebanyak 325.647 keluarga (93,5%) tercatat aktif mengikuti kegiatan sosial atau gotong royong di lingkungannya, menandakan semangat kebersamaan dan kohesi sosial yang tinggi di masyarakat. Hanya 22.440 keluarga (6,5%) yang tidak terlibat dalam kegiatan sosial.

Secara umum, data ini menggambarkan bahwa sebagian besar keluarga di wilayah kabupaten telah menunjukkan indikator kebahagiaan yang cukup baik, terutama dalam hal komunikasi keluarga dan partisipasi sosial. Namun, perlu perhatian lebih dalam hal penguatan pengasuhan bersama dan peningkatan kesempatan rekreasi keluarga guna memperkuat keharmonisan dan kesejahteraan psikologis keluarga.

JUMLAH KELUARGA YANG MENDAPATKAN INFORMASI PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI MEDIA

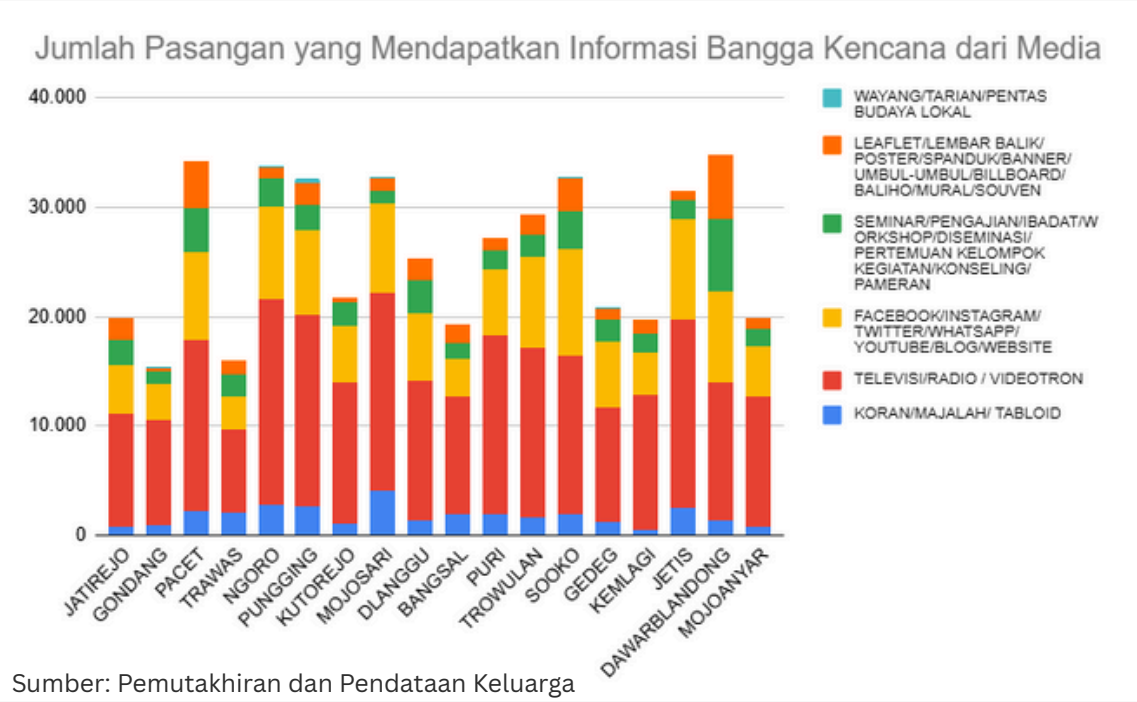

Sumber: Pemutakhiran dan Pendataan Keluarga

Grafik 19 Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Informasi Program Bangga Kencana melalui Media

Tabel Jumlah Keluarga yang Terpapar Pesan/Informasi Program Bangga Kencana Melalui Media memberikan gambaran sejauh mana informasi program pemerintah tersebut menjangkau masyarakat di wilayah kabupaten hingga tahun 2024. Dari total 284.825 keluarga yang terpapar, sebanyak 245.290 keluarga menerima informasi melalui media elektronik seperti televisi, radio, atau videotron, menjadikannya sebagai sumber media paling dominan. Hal ini mencerminkan bahwa media elektronik masih menjadi saluran komunikasi yang paling efektif dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat luas.

Media sosial juga memainkan peran penting, dengan 113.989 keluarga menerima informasi melalui platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan Google Meet. Angka ini menunjukkan tingginya penetrasi teknologi digital di kalangan keluarga dan pentingnya optimalisasi media sosial sebagai media kampanye publik. Selain itu, sebanyak 31.588 keluarga terpapar melalui media cetak seperti koran atau tabloid, menunjukkan bahwa meskipun media cetak telah berkurang peminatnya, ia masih relevan terutama di wilayah yang mungkin memiliki keterbatasan akses digital.

Sumber informasi berbasis komunitas dan tradisional juga tidak kalah penting. Sebanyak 43.227 keluarga memperoleh informasi dari kegiatan kelompok, seperti penyuluhan, pembinaan kelompok kegiatan (poktan), atau kegiatan remaja, yang mengindikasikan peran strategis interaksi tatap muka dalam penyebaran informasi program. Selain itu, 32.054 keluarga mendapatkan informasi melalui Lembar Balik (LEAF), pamflet, brosur, dan bentuk visual lain yang masih efektif terutama untuk edukasi visual.

Menariknya, 1.117 keluarga menerima informasi melalui media tradisional seperti wayang, tarian, pentas budaya lokal, menegaskan bahwa nilai-nilai budaya tetap menjadi jembatan komunikasi yang ampuh di beberapa daerah. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang beragam dan kontekstual agar pesan program Bangga Kencana dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Secara keseluruhan, data ini mencerminkan pentingnya strategi komunikasi multi-platform untuk menjangkau masyarakat secara luas dan merata. Optimalisasi media elektronik dan digital harus terus ditingkatkan, namun tanpa melupakan peran penting komunikasi tatap muka dan pendekatan budaya lokal yang masih efektif di berbagai wilayah.

JUMLAH KELUARGA YANG MENDAPATKAN INFORMASI PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI PETUGAS

Tabel Jumlah Keluarga yang Terpapar Pesan/Informasi Program Bangga Kencana Melalui Petugas memberikan wawasan mengenai peran berbagai jenis petugas dalam menyebarkan informasi program Bangga Kencana di tingkat Kabupaten Mojokerto hingga tahun 2024. Dari total 288.820 keluarga yang menyatakan terpapar informasi melalui petugas, mayoritas menerima informasi dari Petugas Keluarga Berencana (KB), yaitu sebanyak 175.565 keluarga. Hal ini menunjukkan peran strategis petugas KB sebagai ujung tombak komunikasi program di masyarakat.

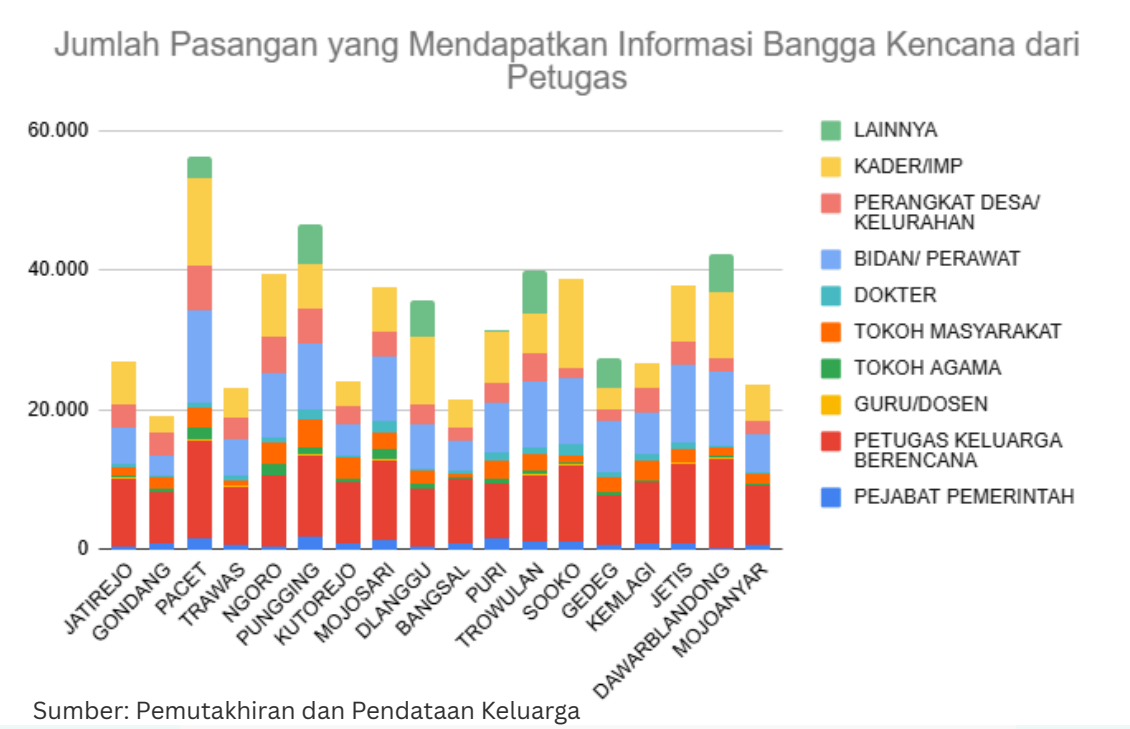

Sumber: Pemutakhiran dan Pendataan Keluarga

Grafik 20 Jumlah Pasangan yang Mendapatkan Informasi Bangga Kencana melalui Petugas

Selain petugas KB, bidan dan perawat juga berkontribusi besar dalam penyebaran informasi, menjangkau sebanyak 136.241 keluarga. Angka ini mencerminkan pentingnya integrasi pesan program dalam layanan kesehatan yang rutin dijangkau masyarakat, seperti pelayanan ibu dan anak. Sementara itu, perangkat desa atau kelurahan juga menjadi sumber informasi yang signifikan, menjangkau 57.788 keluarga. Ini menunjukkan bahwa struktur pemerintahan lokal tetap menjadi saluran komunikasi yang efektif dalam menjembatani program pemerintah kepada warga.

Adapun tokoh masyarakat dan tokoh agama, masing-masing menjangkau 30.856 dan 10.288 keluarga, menunjukkan bahwa figur-figur informal yang memiliki pengaruh sosial tetap memiliki peran penting dalam memperkuat pesan program, terutama di komunitas-komunitas yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional dan keagamaan. Guru/dosen menjangkau 2.351 keluarga, sedangkan dokter berkontribusi terhadap penyebaran informasi ke 13.742 keluarga.

Kategori lainnya, yang kemungkinan mencakup penyuluh lapangan, kader non-formal, dan tokoh masyarakat lainnya, juga cukup signifikan, menjangkau 29.920 keluarga. Hal ini mengindikasikan bahwa penyebaran informasi program bersifat kolaboratif dan multisektor.

Dengan 59.267 keluarga yang belum terpapar informasi melalui petugas, data ini menyoroti masih adanya ruang untuk peningkatan jangkauan, baik dari sisi kuantitas petugas maupun kualitas penyampaian informasi. Oleh karena itu, pelatihan, sinergi antarpetugas, serta optimalisasi peran tokoh masyarakat dan lembaga lokal perlu diperkuat agar pesan program Bangga Kencana semakin menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

PERBANDINGAN
KABUPATEN MOJOKERTO

PERBANDINGAN INDIKATOR FERTILITAS TOTAL (TFR) KABUPATEN MOJOKERTO DENGAN WILAYAH LAINNYA

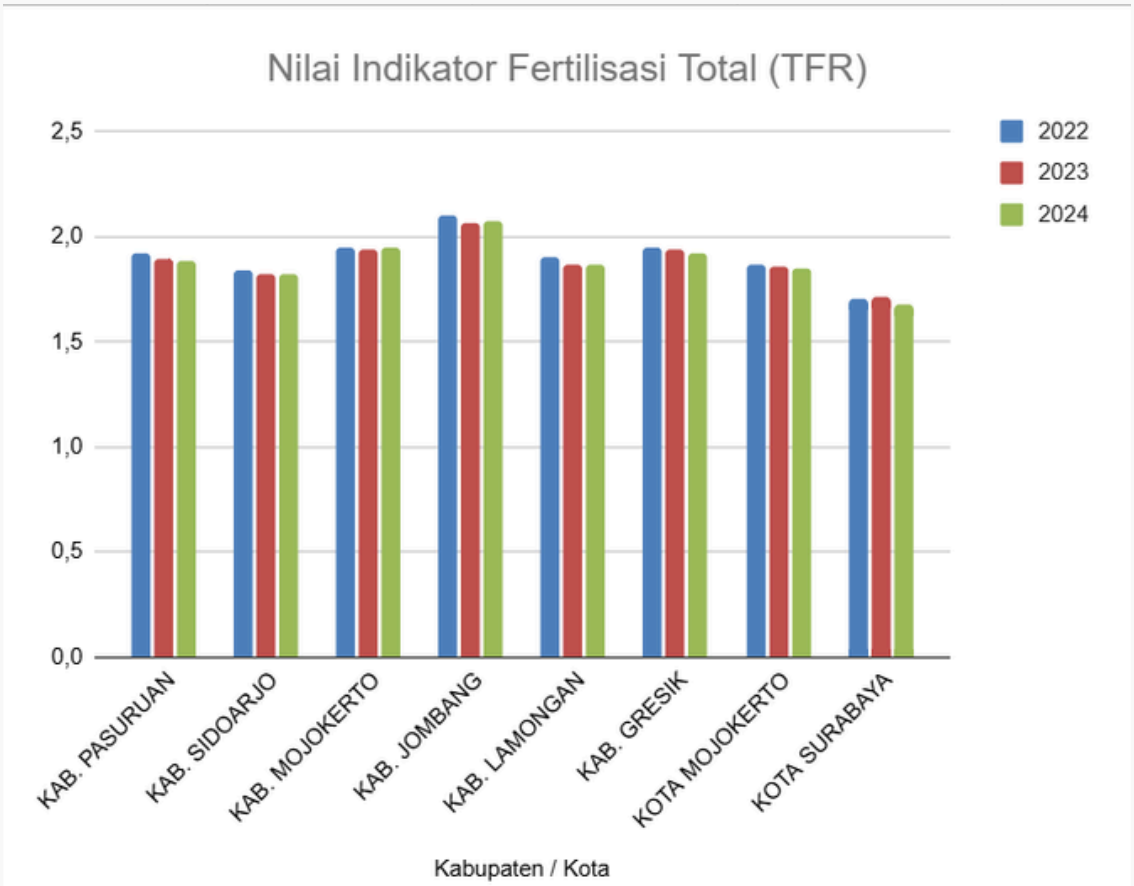

Sumber: Pemutakhiran dan Pendataan Keluarga

Grafik 21 Keterbandingan Mojokerto dengan Daerah Sekitar terhadap Indikator Fertilitas Total (TFR)

Data di atas menunjukkan perkembangan angka rata-rata jumlah anak per wanita usia subur (Total Fertility Rate/TFR) di delapan kabupaten/kota di Jawa Timur selama tiga tahun terakhir, yaitu 2022 hingga 2024. TFR merupakan salah satu indikator penting dalam program pengendalian penduduk dan keluarga berencana, karena mencerminkan tingkat kelahiran dan keberhasilan intervensi kebijakan kependudukan di suatu wilayah. Dari data ini, kita dapat melihat adanya variasi yang cukup menarik antar daerah, baik yang mengalami penurunan, stagnasi, maupun kenaikan.

Kabupaten Mojokerto menunjukkan performa yang relatif stabil dan konsisten dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, angka TFR di daerah ini tercatat sebesar 1,95, sedikit menurun menjadi 1,94 di tahun 2023, namun kembali naik ke angka 1,95 pada tahun 2024. Kestabilan ini mencerminkan keberhasilan Kabupaten Mojokerto dalam menjaga efektivitas program pengendalian kelahiran, sekaligus menunjukkan bahwa sebagian besar pasangan usia subur di daerah ini sudah memiliki kesadaran untuk merencanakan jumlah anak sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi keluarga.

Jika dibandingkan dengan daerah sekitarnya, seperti Kabupaten Jombang yang memiliki angka TFR tertinggi yaitu 2,07 di tahun 2024, maka Kabupaten Mojokerto berada dalam kategori yang lebih ideal. Tingkat TFR di atas 2 seringkali menjadi perhatian karena berpotensi meningkatkan beban demografi di masa depan. Sebaliknya, angka TFR yang terlalu rendah juga tidak diinginkan, karena dapat menyebabkan masalah pada struktur usia produktif. Dalam hal ini, TFR Kabupaten Mojokerto yang mendekati angka ideal 2,1 (pengganti generasi) menunjukkan keseimbangan yang relatif baik.

Dibandingkan dengan kota besar seperti Surabaya (TFR 1,68 di tahun 2024) dan Kota Mojokerto (1,85), Kabupaten Mojokerto masih memiliki angka kelahiran yang sedikit lebih tinggi. Hal ini bisa disebabkan oleh perbedaan gaya hidup, tingkat pendidikan, akses layanan kesehatan, dan kondisi sosial budaya antara daerah perkotaan dan pedesaan. Namun demikian, angka TFR Kabupaten Mojokerto tetap lebih rendah dibandingkan dengan daerah seperti Jombang dan Gresik, yang menunjukkan bahwa program Bangga Kencana di Mojokerto dapat berjalan efektif tanpa harus menurunkan angka kelahiran secara ekstrem.

Secara keseluruhan, Kabupaten Mojokerto dapat dijadikan sebagai contoh daerah dengan pengelolaan program KB yang baik dan stabil. Konsistensi angka TFR selama tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil menjaga keseimbangan antara upaya pengendalian penduduk dan peningkatan kualitas keluarga. Diperlukan sinergi berkelanjutan antara pemerintah daerah, penyuluh KB, dan masyarakat agar pencapaian ini tidak hanya dipertahankan, tetapi juga ditingkatkan melalui pendekatan yang lebih adaptif dan partisipatif di masa mendatang.

PERBANDINGAN JUMLAH WANITA KAWIN (10-49 TAHUN) MENURUT KELOMPOK UMUR KABUPATEN MOJOKERTO DENGAN WILAYAH LAINNYA

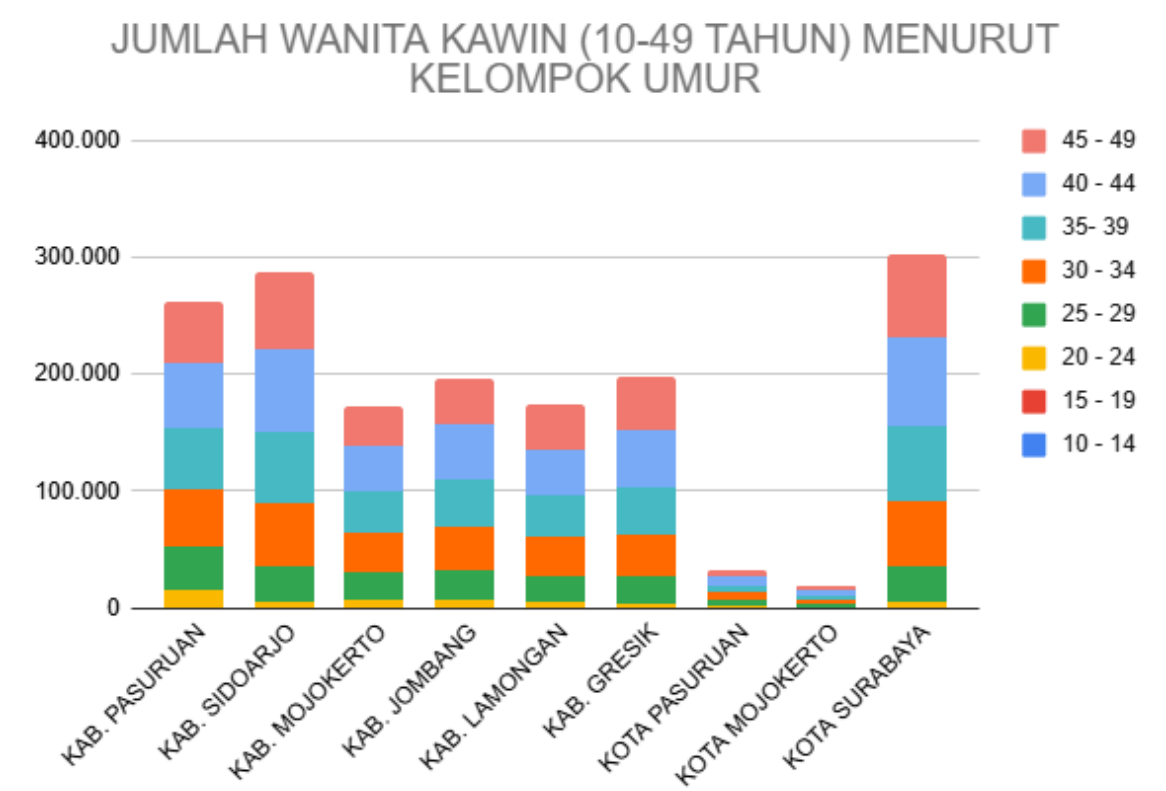

Sumber: Pemutakhiran dan Pendataan Keluarga

Grafik 22 Keterbandingan Mojokerto dengan Daerah Sekitar Jumlah Wanita Kawin (10-49 Tahun) menurut Umur

Kabupaten Mojokerto menunjukkan profil demografi yang sangat menjanjikan jika dibandingkan dengan wilayah sekitarnya. Dengan jumlah penduduk usia produktif (20–44 tahun) yang cukup signifikan, Kabupaten Mojokerto menempatkan dirinya sebagai wilayah yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial.

Secara khusus, kelompok usia 20–24 tahun di Kabupaten Mojokerto mencapai 6.077 jiwa, lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Lamongan (4.342), Kabupaten Gresik (4.075), bahkan Kota Pasuruan (1.630). Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Mojokerto memiliki cadangan tenaga kerja muda yang siap memasuki pasar kerja atau didorong ke sektor kewirausahaan dan inovasi teknologi.

Di kelompok usia 25–29 tahun, Kabupaten Mojokerto menorehkan angka 23.780 jiwa, kembali lebih tinggi daripada Kota Mojokerto (2.512), Kota Pasuruan (4.995), dan bahkan Kabupaten Jombang (26.09), jika disandingkan dengan jumlah di kelompok usia sebelumnya, memperlihatkan kontinuitas yang sehat dalam transisi usia muda ke usia produktif awal.

Lebih jauh, struktur usia Kabupaten Mojokerto juga relatif merata pada kelompok usia 30–34 tahun (34.455) dan 35–39 tahun (35.225). Ini mencerminkan kestabilan demografis yang sangat menguntungkan untuk perencanaan jangka menengah baik dari sisi ketenagakerjaan, pendidikan keluarga, maupun konsumsi rumah tangga.

Sementara kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya mencatat angka yang jauh lebih tinggi secara total, angka-angka tersebut juga mencerminkan beban urbanisasi tinggi, kepadatan, dan tekanan infrastruktur yang bisa menjadi tantangan. Kabupaten Mojokerto, dengan jumlah yang lebih moderat dan terkendali, dapat lebih fokus membangun kualitas hidup penduduk secara lebih merata.

PERBANDINGAN JUMLAH PUS MENURUT STATUS *UNMETNEED* KABUPATEN MOJOKERTO DENGAN WILAYAH LAINNYA

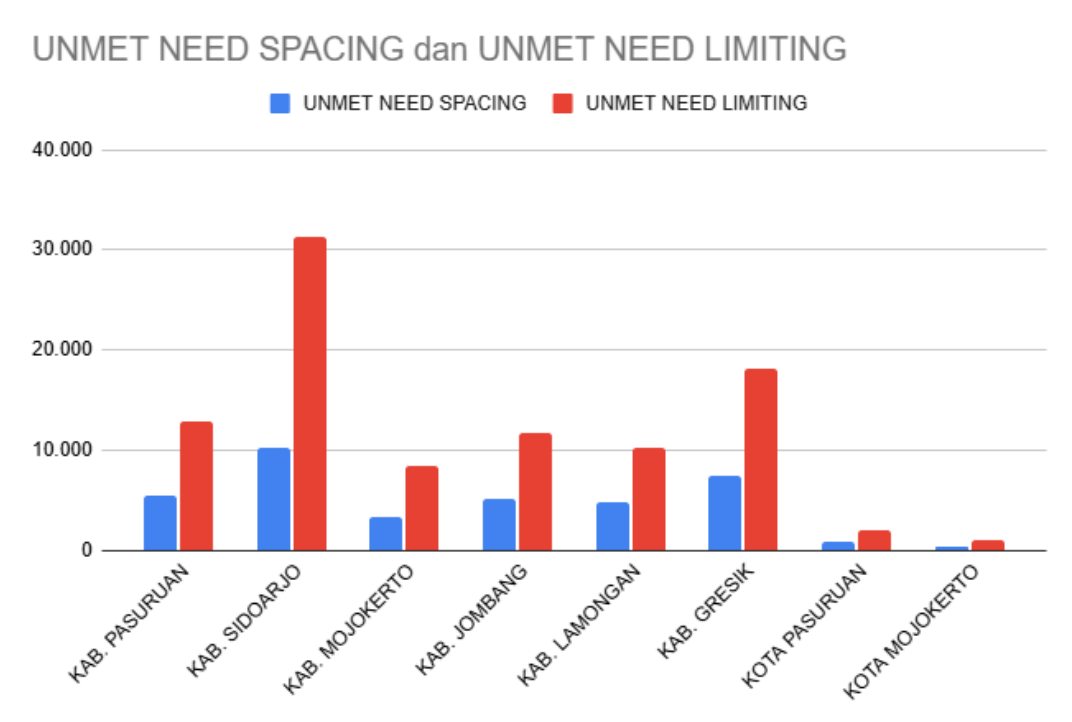

Sumber: Pemutakhiran dan Pendataan Keluarga

Grafik 23 Keterbandingan Mojokerto dengan Daerah Sekitar
Jumlah PUS menurut Status *Unmetneed*

Berdasarkan grafik *Unmetneed Spacing* dan *Limiting*, Kabupaten Mojokerto memperlihatkan posisi lebih baik dibanding kabupaten besar lainnya. Jumlah *Unmetneed Spacing* dan *Limiting* di Kabupaten Mojokerto relatif lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jombang, dan Kabupaten Lamongan.

- *Unmetneed Limiting* di Kabupaten Mojokerto: jauh lebih rendah dibandingkan Kabupaten Sidoarjo yang memiliki angka tertinggi (lebih dari 30.000).
- *Unmetneed Spacing* Kabupaten Mojokerto juga lebih rendah daripada Kabupaten Gresik dan Kabupaten Jombang, menandakan bahwa keluarga di Kabupaten Mojokerto lebih teredukasi dan terakses terhadap layanan keluarga berencana (KB).

Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Mojokerto memiliki kinerja pelayanan KB yang lebih optimal, dengan penduduk yang lebih sadar akan pengaturan kelahiran baik untuk penjarangan maupun pembatasan.

Kabupaten Mojokerto menempati posisi strategis dalam struktur kependudukan regional Jawa Timur. Dari sisi komposisi usia produktif, Kabupaten Mojokerto menunjukkan angka yang sangat kompetitif. Pada rentang usia produktif awal (20–39 tahun), Kabupaten Mojokerto memiliki total 94.312 jiwa jumlah yang cukup besar untuk wilayah non-metropolitan dan menunjukkan basis tenaga kerja yang luas dan stabil. Hal ini menjadi modal penting dalam pembangunan ekonomi lokal dan pengembangan sektor industri kecil dan menengah.

Ketika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, Kabupaten Mojokerto memiliki rasio yang sehat antara kelompok usia produktif dan usia non-produktif, serta peningkatan populasi usia produktif yang tidak terlalu tajam sehingga masih bisa dikelola dengan baik oleh infrastruktur yang tersedia.

KESIMPULAN

Berdasarkan laporan pemutakhiran pendataan keluarga Kabupaten Mojokerto yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa:

1. Kabupaten Mojokerto memiliki total 173.521 Pasangan Usia Subur (PUS), dengan mayoritas telah memiliki 2 anak lahir hidup (80.210) dan 2 anak masih hidup (80.263). Hal ini menunjukkan bahwa pola ideal dua anak masih menjadi preferensi utama keluarga di Mojokerto.
2. Sebanyak 128.772 PUS telah menjadi peserta KB aktif dengan metode kontrasepsi modern, dengan metode suntik menjadi yang paling dominan (83.807), diikuti oleh pil dan implan. Hal ini menunjukkan tingginya partisipasi dan preferensi terhadap metode jangka pendek.
3. Terdapat 11.786 PUS yang termasuk dalam kategori *unmetneed*, yaitu mereka yang tidak menggunakan alat/cara KB padahal ingin menjarakkan atau membatasi kelahiran. Ini menjadi perhatian khusus untuk optimalisasi edukasi dan pelayanan KB.
4. Sebanyak 129.039 keluarga menyatakan pernah memperoleh informasi tentang alat/cara KB, dengan mayoritas menerima informasi tentang jenis alat (123.370). Meskipun demikian, pemahaman tentang efek samping dan penanganannya perlu terus ditingkatkan agar keputusan ber-KB menjadi lebih rasional
5. Dari 44.160 PUS yang bukan peserta KB, alasan tertinggi adalah karena masih ingin memiliki anak (29.958), diikuti alasan kesehatan dan ketidaktahuan. Faktor sosial seperti penolakan suami/keluarga juga masih muncul sebagai hambatan.

6. Sebagian besar keluarga di Mojokerto memiliki tingkat ketentraman tinggi, dengan lebih dari 85% tidak mengalami gangguan dalam bentuk konflik rumah tangga, kejahatan, maupun kekerasan. Namun, masih terdapat 1.329 keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, yang memerlukan intervensi psikososial.
7. Lebih dari 308.563 keluarga (88.6%) memiliki penghasilan tetap dan tempat tinggal layak huni. Namun, masih terdapat sekitar 39.524 keluarga (11.4%) yang belum memiliki akses terhadap pendidikan atau literasi digital melalui media daring, menjadi peluang intervensi program peningkatan kualitas SDM.
8. Indikator kebahagiaan menunjukkan bahwa 301.470 keluarga memiliki waktu berkualitas bersama keluarga, dan 325.647 terlibat dalam kegiatan sosial/gotong royong. Ini mencerminkan kekuatan modal sosial yang baik di masyarakat Mojokerto.
9. Dari 284.825 keluarga yang terpapar informasi program Bangga Kencana melalui media, mayoritas mengakses melalui TV/radio sebanyak 245.290, diikuti media sosial. Namun, media cetak dan budaya lokal masih minim dimanfaatkan, menunjukkan perlunya diversifikasi media komunikasi.
10. Sebanyak 288.820 keluarga menerima informasi dari petugas, terutama dari Petugas Keluarga Berencana sebanyak 175.565, bidan/perawat, dan perangkat desa. Ini menegaskan pentingnya peran petugas lapangan dalam diseminasi informasi program kependudukan.
11. Kabupaten Mojokerto memiliki angka TFR yang cukup stabil di angka 1,95 selama tiga tahun (2022–2024), dan berada di bawah angka pengganti generasi sebesar 2,1. Ini menunjukkan keberhasilan dalam pengendalian angka kelahiran, namun tetap perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas generasi penerus.

Detil Metadata Kegiatan Kompilasi Data Hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga Kabupaten Mojokerto

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto

+ Tambah MS-Variabel

Metadata Statistik Kegiatan | Metadata Statistik Variabel 11 | Metadata Statistik Indikator 18

No.	Nama Variabel	Alias	Referensi SDS	Produsen Data	Pelapor	Tanggal Diajukan	Status	Aksi
1	Petugas yang memberikan informasi program bangga kencana	Petugas yang memberikan informasi program bangga kencana	Tidak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto	Diskominfo Mojokerto	25 Agustus 2025	Submit	
2	Media mendapatkan informasi program bangga kencana	Media mendapatkan informasi program bangga kencana	Tidak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto	Diskominfo Mojokerto	25 Agustus 2025	Submit	
3	Status Hubungan Kekerabatan	Hubungan dengan kepala keluarga	Ya	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto	Diskominfo Mojokerto	25 Agustus 2025	Submit	
4	Jenis Kelamin	jenis kelamin	Ya	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto	Diskominfo Mojokerto	25 Agustus 2025	Submit	
5	Status Pekerja	pekerjaan	Ya	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto	Diskominfo Mojokerto	25 Agustus 2025	Submit	
6	usia kawin pertama	usia perkawinan pertama	Tidak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto	Diskominfo Mojokerto	25 Agustus 2025	Submit	
7	pendidikan	Kualifikasi Pendidikan	Ya	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto	Diskominfo Mojokerto	25 Agustus 2025	Submit	
8	Umur/Usia	Usia	Ya	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto	Diskominfo Mojokerto	25 Agustus 2025	Submit	
9	Pasangan Usia Subur	Pasangan Usia Subur	Ya	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto	Diskominfo Mojokerto	20 Agustus 2025	Submit	
10	unmetneed	unmetneed	Tidak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto	Diskominfo Mojokerto	20 Agustus 2025	Submit	

11	Akseptor KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang)	Akseptor KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang)	Ya	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto	Diskominfo Mojokerto	20 Agustus 2025	Submit		

Detil Metadata Kegiatan Kompilasi Data Hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga Kabupaten Mojokerto

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto

+ Tambah MS-Indikator

Metadata Statistik Kegiatan | Metadata Statistik Variabel 11 | Metadata Statistik Indikator 18

No.	Nama Variabel	Referensi SDS	Produsen Data	Pelapor	Tanggal Diajukan	Status	Aksi
1	Info metode KB yang didapatkan	Tidak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto	Diskominfo Mojokerto	25 Agustus 2025	Submit	
2	Jumlah kepala keluarga menurut Pendidikan terakhir	Tidak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto	Diskominfo Mojokerto	25 Agustus 2025	Submit	
3	Jumlah keluarga menurut umur anak yang dimiliki	Tidak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto	Diskominfo Mojokerto	25 Agustus 2025	Submit	
4	Jumlah kepala keluarga menurut pekerjaan	Tidak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto	Diskominfo Mojokerto	25 Agustus 2025	Submit	
5	Jumlah lansia 60+ tahun menurut kelompok umur	Tidak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto	Diskominfo Mojokerto	25 Agustus 2025	Submit	
6	Jumlah pasangan usia subur (PUS) peserta KB menurut metode kontrasepsi modern	Tidak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto	Diskominfo Mojokerto	25 Agustus 2025	Submit	
7	menurut status unmetneed	Tidak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto	Diskominfo Mojokerto	25 Agustus 2025	Submit	
8	Jumlah wanita menurut umur kawin pertama	Tidak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto	Diskominfo Mojokerto	25 Agustus 2025	Submit	
9	Jumlah Kepala Keluaraga Menurut Umur	Tidak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto	Diskominfo Mojokerto	25 Agustus 2025	Submit	
10	Jumlah Keluarga menurut Dimensi Kemandirian	Tidak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto	Diskominfo Mojokerto	25 Agustus 2025	Submit	
11	Jumlah pasangan usia subur (PUS)	Tidak	Dinas Pengendalian	Diskominfo Mojokerto	20 Agustus 2025	Submit	

	menurut umur kawin pertama		Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto				
12	Jumlah keluarga menurut dimensi kebahagiaan	Tidak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto	Diskominfo Mojokerto	25 Agustus 2025	Submit	
13	Jumlah bukan peserta KB Menurut alasan tidak ber KB	Tidak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto	Diskominfo Mojokerto	25 Agustus 2025	Submit	
14	Jumlah keluarga yang mendapatkan informasi program bangga kencana melalui Petugas	Tidak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto	Diskominfo Mojokerto	25 Agustus 2025	Submit	
15	Jumlah keluarga yang mendapatkan informasi program bangga kencana melalui media	Tidak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto	Diskominfo Mojokerto	25 Agustus 2025	Submit	
16	Jumlah anak umur 7-24 tahun menurut status Pendidikan	Tidak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto	Diskominfo Mojokerto	25 Agustus 2025	Submit	
17	Jumlah pasangan usia subur (PUS) menurut anak lahir pertama hidup dan masih hidup	Tidak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto	Diskominfo Mojokerto	25 Agustus 2025	Submit	
18	Jumlah keluarga menurut dimensi ketentraman	Tidak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto	Diskominfo Mojokerto	25 Agustus 2025	Submit	